

ANNUAL REPORT 2023



Jl. Raya Serang KM. 15 No. 1
Cikupa Kab. Tangerang
www.bprkrngemilang.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
VISI & MISI	iii

BAGIAN KESATU

Informasi Umum

1. Informasi Pengurus	2
2. Kepemilikan	6
3. Perkembangan Usaha	6
4. Strategi dan Kebijakan Manajemen	9
5. Laporan Manajemen	19

BAGIAN KEDUA

Laporan Keuangan Tahunan & Opini dari Akuntan Publik

1. Opini dari Akuntan Publik	42
2. Kinerja Keuangan Tahun 2023	45

BAGIAN KETIGA

Pengungkapan Informasi Lainnya

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	98
2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan	110
3. Rasio Keuangan	118
4. Komitmen dan Kontijensi	120
5. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Yang Berlaku Bagi BPR	121

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan limpahan karunia-Nya. Perkenankan kami menyampaikan laporan hasil usaha PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) Kabupaten Tangerang, untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi dokumen strategi yang cukup memadai sebagai sumber informasi dalam memberikan gambaran umum tentang kinerja Keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Sepanjang Tahun 2023, kami berupaya meningkatkan fungsi intermediasi dengan menggali potensi sumber dana dari pihak ketiga, dana antar bank, maupun sumber dana lainnya dan meningkatkan ekspansi kredit untuk dapat menunjang pertumbuhan pendapatan guna meningkatkan laba usaha.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah dilakukan melalui penyempurnaan Teknologi Informasi (TI), yang dapat mendukung real time transaction dan dalam pelayanan pemberian kredit diarahkan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat menopang pertumbuhan usaha dan pendapatan BPR.

Demikian laporan tahunan ini kami susun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan.

VISI DAN MISI PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)

VISI / VISION

**“ Menjadi Perusahaan Daerah BPR Terbaik
di Provinsi Banten”**

MISI / MISSION

- **Membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan;**
- **Membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;**
- **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Bagian Kesatu Informasi Umum



1) Profil Pengurus Perusahaan

• DIREKSI



Ai Suherlan, Direktur Utama

Lahir di Tasikmalaya 10 Desember tahun 1969, Alumni Fakultas Ekonomi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1999. Pengalaman dalam dunia perbankan ditekuninya sejak tahun 1991 sebagai Staff di LPK Kasemen Kabupaten Serang. Bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sebelum menjabat Direktur Utama PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero), beliau juga pernah menjadi Direktur Utama PD BPR LPK Serang dan Direktur Pemasaran Hasil Merger PD BPR Serang.

Uus Mustaudie, Direktur Operasional

Lahir di Serang tanggal 29 Juni 1967, Lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Terbuka Tahun 2003, sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional di PT. BPR Kerta Raharja Gemilang beliau memulai karir di LPK Cinangka sebagai staff Tahun 1990, Kredit tahun 1992, Direktur Tahun 1998, Direktur Utama di PD BPR LPK Cinangka pada tahun 2000 dan menjadi Kepala Cabang PD BPR Serang pasca Merger pada tahun 2008, kemudian bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) sejak tahun 2011 sampai sekarang.



Deni Setia Wahyudi, Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

Lahir di Serang tanggal 1 April 1973, Lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Mathlul Anwar Pandeglang Tahun 2006, sebelum menjabat sebagai Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan di PT. BPR Kerta Raharja Gemilang beliau memulai karir di PD. BPR LPK Anyar sebagai staff Kredit Tahun 2002, menjabat sebagai Direktur Operasional di PD BPR LPK Anyar pada tahun 2009 dan menjabat sebagai Kepala Cabang Cinangka PD BPR Serang pada tahun 2018, kemudian bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) sejak tahun 2018 sampai sekarang.



• KOMISARIS



Drs. Yusuf Herawan, Komisaris Utama

Lahir di Sengkong, 10 November 1962. Menempuh pendidikan S1 di Institut Ilmu Pemerintahan pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Drs. Dari Tahun 1994 sampai dengan sekarang beliau berkecimpung di bidang pemerintahan dengan jabatan terakhir beliau sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Menjadi Komisaris utama PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) pada tanggal 21 Desember 2021.

Beni Subarsyah, Komisaris Independent

Lahir di Bandung, 14 Februari 1964. Menempuh pendidikan S1 di STIE PASIM Jurusan Manajemen pada Tahun 2007 dan mendapatkan gelar S2 di STM-IMNI pada tahun 2010. Tahun 1993-2003 bekerja sebagai Staff Operasional PD. BPR Ciwidey, tahun 2003-2010 bekerja di PD. BPR Soreang, tahun 2010-2015 bekerja di PD. BPR Kab, Bandung, tahun 2015-2021 bekerja di PT. BPR Kerta Raharja dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan. Bergabung dengan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) pada tahun 2022 sebagai komisaris Independent.



Bangbang Purnawan, Komisaris Independent

Lahir di Bandung Tahun 1967. Menempuh pendidikan S1 di ITB Bandung dan mendapat gelar S2 Manajemen di IKOPIN. Tahun 1994-2000 bekerja Bank Muamalat. Tahun 2000-2011 bekerja di PT. PNM (Persero), Tahun 2012-2019 bekerja sebagai Credit Risk Manager BPR-LKM Lending Head BPR Planning&Control Head Bank Oke Indonesia d/h Bank Andara. Juli 2020 bekerja sebagai Internal Audit di PT. Hariarta Sedana dan efektif 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris. November 2021 sampai dengan sekarang menjadi Komisaris Independent PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero).



• PEJABAT EKSEKUTIF



Fristy Lestari,
Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Irfan Hilmi H.,
Kepala Satuan Kerja
Kepatuhan dan Manajemen Risiko



Alif,
Kepala Satuan Kerja
Teknologi Informasi



Ahmad Firdaus,
Kepala Bagian Operasional



Natalia Tri Rahayu,
Kepala Bagian Akuntansi
& Pelaporan



Denny Kristiyanto,
Kepala Bagian SDM dan Umum

• PEJABAT EKSEKUTIF



Abdul Ghani,
Kepala Kantor Pusat
Operasional



Rochaidin,
Kepala Kantor Cabang
Kelapa Dua



Taufik Firdaus,
Kepala Kantor Cabang
Balaraja



Dewi Sulastri,
Kepala Kantor Cabang
Pasar Kemis



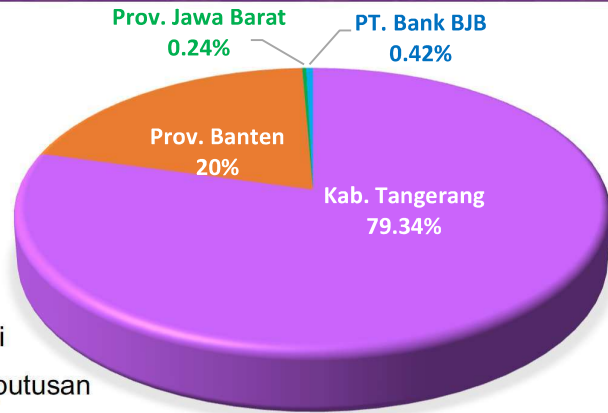
Eka Ratna Juwita,
Kepala Kantor Cabang
Tigaraksa



Ashadi Ruswandi,
Kepala Kantor Cabang
Serang

2. Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementerian Hukum dan Ham dengan nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Perseroda, bahwa komposisi kepemilikan modal disetor adalah sebagai berikut :



dalam ribuan rupiah

PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR SETELAH PERUBAHAN		MODAL DISETOR		MODAL BELUM DI SETOR
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
Pemerintah Kab. Tangerang	198,350,000	79.34%	55,000,000	76.76%	143,350,000
Pemerintah Prov. Banten	50,000,000	20.00%	15,000,000	20.94%	35,000,000
Pemerintah Prov. Jawa Barat	600,000	0.24%	600,000	0.84%	-
PT. Bank BJB	1,050,000	0.42%	1,050,000	1.47%	-
Jumlah	250,000,000	100.00%	71,650,000	100.00%	178,350,000

3. Perkembangan Usaha

a. Riwayat Singkat

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kerta Raharja didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan telah mendapat izin operasional dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/3/Kep.GBI/DpG/2008, tanggal 22 Januari 2008 serta mulai melaksanakan kegiatan operasional sejak tanggal 08 Februari 2008.

Berdasarkan pendiriannya PD. BPR Kerta Raharja merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. PD. BPR Kerta Raharja berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 15 No. 1 Cikupa Kabupaten Tangerang dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, nomor 9 Tahun 2019, Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah. Telah mendapatkan keputusan dari Kementerian Hukum dan Ham dengan nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Pada Tahun 2019 PD. BPR Kerta Raharja melakukan perubahan Badan Hukum menjadi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan telah mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor KEP-22/KR.01/2021 Tentang Pengalihan Izin Usaha atas Perubahan Badan Hukum PD Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

INDIKATOR KEUANGAN	2022 Rp.000	2023 Rp.000	PERTUMBUHAN	
			Rp.000	%
Aset	577.885.946	588.779.718	10.893.772	1,89%
Kredit yang diberikan	447.479.475	479.592.674	32.113.199	7,18%
Dana pihak ketiga	142.777.109	160.046.050	17.268.941	12,10%
Pendapatan	91.618.027	90.337.743	(1.280.284)	-1,40%
Biaya	79.383.535	84.446.671	5.063.136	6,38%
Laba Sebelum Pajak	12.234.492	5.891.072	(6.343.420)	-51,85%
Laba Bersih	9.542.904	4.551.158	(4.991.746)	-52,31%

c. Rasio-Rasio Keuangan

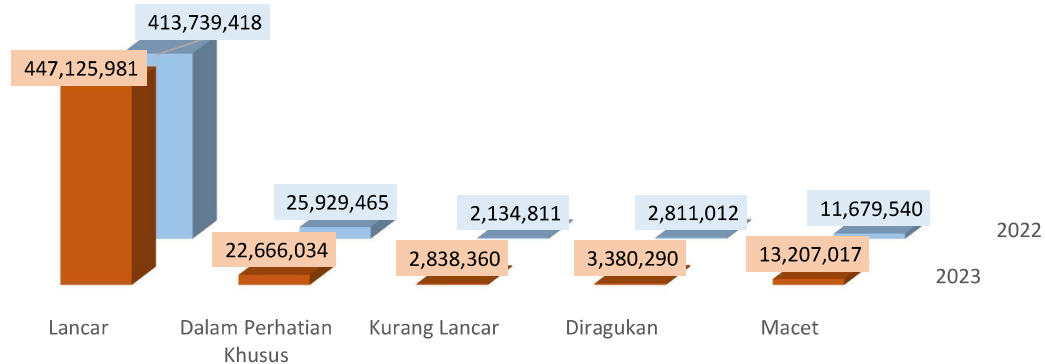
Rasio Keuangan	2023	2022
KPMM Tier 1	25.85%	24.06%
KPMM Tier 2	24.61%	23.83%
KAP	2.87%	3.05%
NPL NETT	2.15%	1.80%
ROA	1.00%	2.22%
ROE	4.44%	9.26%
NIM	8.35%	9.70%
BOPO	93.36%	86.65%
CASH RATIO	25.07%	63.29%
LDR	86.47%	86.12%

d. Non Performing Loan

1) Jumlah dan Prosentase NPL

dalam ribuan rupiah

Kualitas Kredit	2023		2022		Pertumbuhan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Lancar	447,125,981	91.40%	413,739,418	90.67%	33,386,563	8.07%
Dalam Perhatian Khusus	22,666,034	4.63%	25,929,465	5.68%	(3,263,431)	-12.59%
Kurang Lancar	2,838,360	0.58%	2,134,811	0.47%	703,549	32.96%
Diragukan	3,380,290	0.69%	2,811,012	0.62%	569,278	20.25%
Macet	13,207,017	2.70%	11,679,540	2.56%	1,527,476	13.08%
Jumlah	489,217,681	100%	456,294,246	100%	32,923,436	7%
NPL	19,425,667	3.97%	16,625,363	3.64%	2,800,304	16.84%



2) Penyebab utama terjadinya NPL

- Produk Kredit Multiguna; terjadinya NPL pada produk kredit Multiguna berupa kredit konsumtif kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), pada umumnya disebabkan oleh :
 - Persaingan dengan Bank Umum berupa pemberian fasilitas kredit tambahan kepada pegawai ASN tanpa memperhitungkan kewajiban angsuran kepada pihak BPR;
 - Indisipliner pegawai ASN yang mengakibatkan penurunan jabatan dan/atau pengurangan penghasilan;
 - Pemberhentian pegawai ASN;
 - Pegawai ASN yang pensiun dini;
 - Perpindahan tugas pegawai ke luar daerah.
- Produk Kredit Penghasilan Tetap; terjadinya NPL pada produk kredit yang diberikan kepada para pegawai tetap, karyawan swasta, buruh, dsb pada umumnya disebabkan oleh :
 - Pemberhentian hubungan kerja (PHK) dikarenakan pabrik tutup atau pindah keluar kota;
 - Berhenti bekerja karena alasan lainnya;

3. Pindah alamat yang tidak diketahui.
- c. Produk Kredit Multi Usaha; terjadinya NPL pada kredit produktif yang diberikan kepada para usaha mikro dan kecil, disebabkan oleh :
 1. Pelanggan yang tidak menepati janji pembayaran;
 2. Usaha yang terhenti disebabkan oleh berbagai faktor;
 3. Omzet usaha yang berkurang karena persaingan usaha, dsb;
 4. Musibah keluarga sakit, dsb;

3) Jaringan Kantor dan Perluasan Jaringan Pelayanan

Pada tahun 2023 BPR tidak melakukan pembukaan jaringan kantor cabang maupun kantor kas. Untuk dapat menjangkau pelayanan nasabah secara lebih luas, maka BPR melakukan perluasan pelayanan melalui Layanan Mobil Kas Keliling.

4. Strategi dan Kebijakan Manajemen

1) Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 bertujuan untuk memelihara pertumbuhan usaha secara sehat dan berkelanjutan dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik, antara lain meliputi :

- 1) Perubahan struktur organisasi untuk mengantisipasi perkembangan usaha dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perluasan jaringan pelayanan dengan pengadaan mobil kas keliling;
- 3) Peningkatan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan komposisi sumber dana pihak ketiga;
- 5) Pemeliharaan nasabah yang menjadi pangsa pasar utama (*captive market*) bidang perkreditan;
- 6) Peningkatan kegiatan promosi dan edukasi nasabah;
- 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

2) Penerapan Tata Kelola

Prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan dalam penerapan tata Kelola BPR, yaitu :

- 1) Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat;

- 4) Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3) Landasan Hukum Pelaksanaan Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Kabupaten Tangerang berpedoman pada:

- 1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Peraturan Direksi Nomor 03/PDIR/BPR-KRG/IX/2021 Tentang Standar Dan Prosedur Kepatuhan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

4) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

1) Jumlah dan komposisi anggota Direksi

- a) Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- b) Susunan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan.
- c) Setiap anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi, sebagaimana berikut :

No.	Nama	Jabatan	Sertifikat		Masa Jabatan
			Nomor	Tanggal	
1	Ai Suherlan	Direktur Utama	KEU 005 2620 2018	22/10/2023	2019-2024
2	Uus Mustaudie	Direktur Operasional	KEU 005 2448 2018	18/09/2023	2019-2024
3	Deni Setia Wahyudi	Dir. SDM, Umum dan Kepatuhan	KEU 005 2335 2018	18/09/2023	2022-2027

- d) Jumlah Direksi BPR saat ini sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 08 Mei 2018 dan tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-593/KR.0113/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Laporan Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- e) Direksi dan dengan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- f) Direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan lain.

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Perusahaan lain	Nama Perusahaan
1	Ai Suherlan	Direktur Utama	Tidak ada	-
2	Uus Mustaudie	Direktur Operasional	Tidak ada	-
3	Deni Setia Wahyudi	Dir. SDM, Umum dan Kepatuhan	Tidak ada	-

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab anggota Direksi.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.
- Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Jumlah dan komposisi anggota Komisaris

- Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 24 ayat (1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), wajib memiliki Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. Pada tahun 2023 ini Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang.
- Komisaris diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
- Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, pasal 25 ayat (1) BPR yang memiliki modal inti

paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen

- d) BPR telah memiliki 2 (Dua) Komisaris Independen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 15 September 2022, sehingga saat ini jumlah Komisaris Independen sudah terpenuhi.
- e) Seluruh Komisaris diangkat melalui proses seleksi sesuai dengan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- f) Komisaris telah memiliki sertifikasi komisaris dari LSP(Lembaga Sertifikasi Profesi) sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sertifikat	
			Nomor	Tanggal
1	Yusuf Herawan	Komisaris Utama	KEU 005 1444 2021	25/10/2021
2	Bangbang Purnawan	Komisaris Independen	KEU 005 3715 2019	25/03/2019
3	Beni Subarsyah	Komisaris Independen	KEU 005 1646 2021	25/10/2021

- g) Komisaris dan dengan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris

- a) Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b) Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c) Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d) Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e) Komisaris telah membentuk Komite Audit Internal dan Komite Pemantauan Risiko sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR.

- f) Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya.
- g) Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

5) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Sesuai dengan Pasal 32 POJK Tata Kelola bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite, yaitu:

- 1. Komite Audit; dan
- 2. Komite Pemantau Risiko.

Saat ini PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang tertuang pada Peraturan Direksi Nomor 13a/PDIR/BPR-KRG/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Tugas dari Komite Audit adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris terkait dengan audit intern dan eksternal.

Tugas dari Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

6) Penanganan benturan kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari, jajaran pengurus berkomitmen penuh bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keputusan yang harus tetap diambil maka keputusan yang diambil tetap akan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan diantaranya adalah:

- 1) BPR memiliki ketentuan intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 07/PDIR/BPR-KRG/VI/2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
 - 2) Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam hal terdapat keputusan yang mengandung benturan kepentingan. (pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Direksi dan Komisaris.
 - 3) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian suku bunga, dsb.
 - 4) Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara membandingkan dari beberapa penawaran dari penyedia barang dan jasa.
- 7) Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal**
- 1) **Penerapan fungsi kepatuhan**
 - a) Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan menjalankan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - b) BPR telah membentuk Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT untuk membantu Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan.
 - c) Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT mensosialisasikan ketentuan intern dan ektern pada setiap unit kerja yang berkaitan.
 - d) Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada OJK dan Komisaris.
 - e) Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - f) Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan Satuan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2) Penerapan fungsi Audit Internal

- a) BPR telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama.
- b) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- c) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Pedoman Operasional Audit Intern, Internal Audit Charter, Ketentuan Intern BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- d) SKAI dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus sesuai dengan program kerja audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris.
- e) SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- f) SKAI telah melaksanakan program kerja audit secara efektif dan efisien.

3) Penerapan fungsi Audit Ekstern

- a) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- b) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- c) Berdasarkan laporan Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan Nomor 000182/2.0923/AU.2/07/0005-1/1/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa hasil audit adalah laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Persero) Kabupaten Tangerang tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

h. Penerapan Manajemen Resiko dan pengendalian intern

1) Pengawasan aktif, Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif, Komisaris dan Direksi dalam rangka penerapan Manajemen Resiko dan pengendalian intern, dilakukan antara lain melalui:

- a) Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Pengawas dapat dibantu oleh Audit Intern.
- b) Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
- c) Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap semester.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

- a) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- b) Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur.
- c) Telah merancang kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- d) BPR sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
- e) BPR telah menetapkan limit risiko untuk setiap jenis risiko.
- f) Memastikan bahwa otorisasi limit-limit telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan.

3) Cakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko

- a) Memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dan kegiatan operasional telah akurat dan tepat.
- b) Memberikan perhatian yang lebih pada potensi risiko yang dinilai tinggi pada aktivitas Bank seperti kegiatan operasional dan perkreditan.

4) Sistem pengendalian Internal

- a) Mengevaluasi Struktur Organisasi dan kecukupan jumlah Sumber Daya Manusia dan melengkapi wewenang, uraian tugas dan tanggung jawab seluruh pegawai.
- b) SKAI melakukan pemeriksaan secara berkala dan insidental terhadap pelaksanaan tugas tiap unit kerja.
- c) Pengawasan aktif dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerjanya.
- d) Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko pada Dewan Pengawas setiap semester.

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- 1) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2) Bank telah mendata pihak terkait beserta keluarganya.
- 3) Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroa).
- 4) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- 5) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
- 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2023 sebagaimana tabel berikut:

dalam ribuan rupiah

No.	Penyediaan Dana	NOA	Jumlah Nominal
1	Pihak Terkait	11	2,285,014
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	11,213,391
	b. Group	3	3,074,436
	Jumlah	39	16,572,840

j. Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola BPR

No	ASPEK YANG DINILAI	NILAI FAKTOR
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,278
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris	0,176
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,038
4	Penanganan benturan kepentingan	0,200
5	Penerapan fungsi kepatuhan	0,190
6	Penerapan fungsi audit intern	0,158
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,025
8	Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern	0,180
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,150
10	Rencana Bisnis BPR	0,150
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,128
Total Nilai Komposit		1,673
Predikat Nilai Komposit		SANGAT BAIK

k. Kebijakan Manajemen Risiko

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka sampai dengan periode 31 Desember 2023 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membentuk Komite Pemantau Risiko yaitu struktur organisasi di tingkat Komisaris yang terkait penerapan manajemen risiko, yang berfungsi membantu tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait penerapan manajemen risiko.
2. Membentuk struktur organisasi di tingkat Operasional yang terkait penerapan manajemen risiko, meliputi ;
 - a) Komite Manajemen Risiko yaitu unit yang tidak bersifat struktural yang berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, dengan keanggotaan :
 - 1) Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan
 - 2) Direktur Operasional
 - 3) Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
 - 4) Pejabat eksekutif lainnya pada KPNO.
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala. Dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Manajemen risiko digabung dengan fungsi Kepatuhan dan APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).
 - c) Pelaksanaan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, meliputi :

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris;
 - 2) Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur dan limit risiko;
 - 3) Kecukupan proses dan sistem manajemen risiko;
 - 4) Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh; dan
 - 5) Penerapan manajemen risiko dalam rangka menetapkan produk dan aktifitas baru.
 - 6) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal, meliputi :
- a) Mengikutsertakan Pejabat Eksekutif untuk mengikuti Sertifikasi Direksi Level 1 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebanyak 6 orang.
 - b) Memasukkan materi manajemen risiko setiap pelatihan internal meliputi pelatihan pemasaran kredit, supervisi kredit, pemasaran dana dan jasa, akuntansi, kepegawaian dan umum.
4. Hasil Penilaian Sendiri Profil Risiko BPR

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	3	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	1	1
Risiko Kepatuhan	2	1	1	2	1	1
Risiko Likuiditas	2	1	1	2	2	2
Risiko Reputasi	1	1	1	1	2	1
Risiko Stratejik	3	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			2			2

5. Laporan Manajemen

a) Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dan segenap manajemen Perusahaan. Komisaris juga telah memberikan

pandangannya serta menyampaikan sarannya terkait implementasi strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada Tahun 2023 dalam menjalankan tugasnya Komisaris dibantu oleh komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantauan Resiko. Komisaris menilai bahwa setiap komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

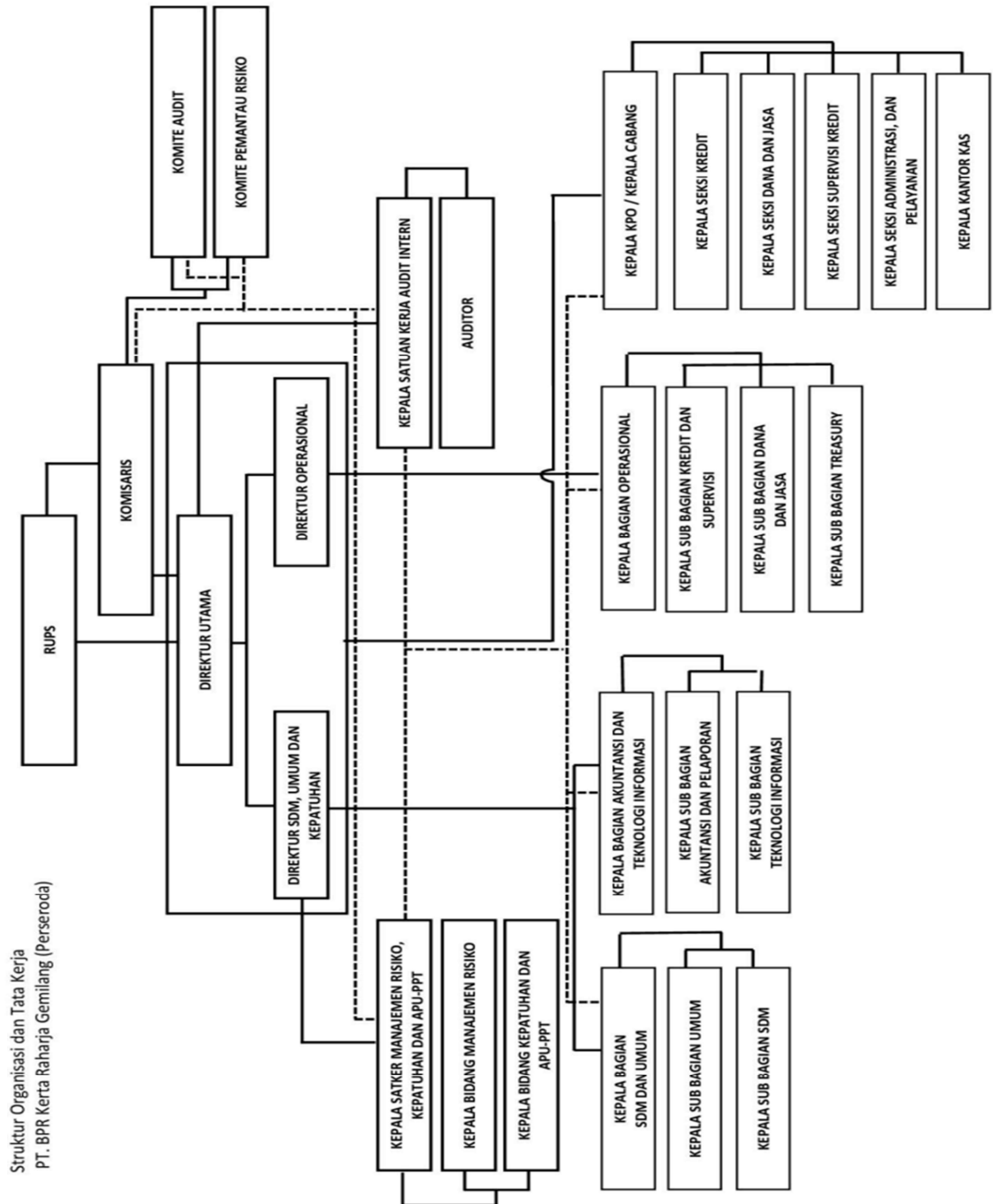
Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan bisnis oleh Direksi, serta memberikan panduan ketika dibutuhkan melalui rapat. Dalam rapat-rapat tersebut, Komisaris meninjau antara lain kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta perkembangan strateginya, dan membahas bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam bisnis serta mengkaji perkembangan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko.

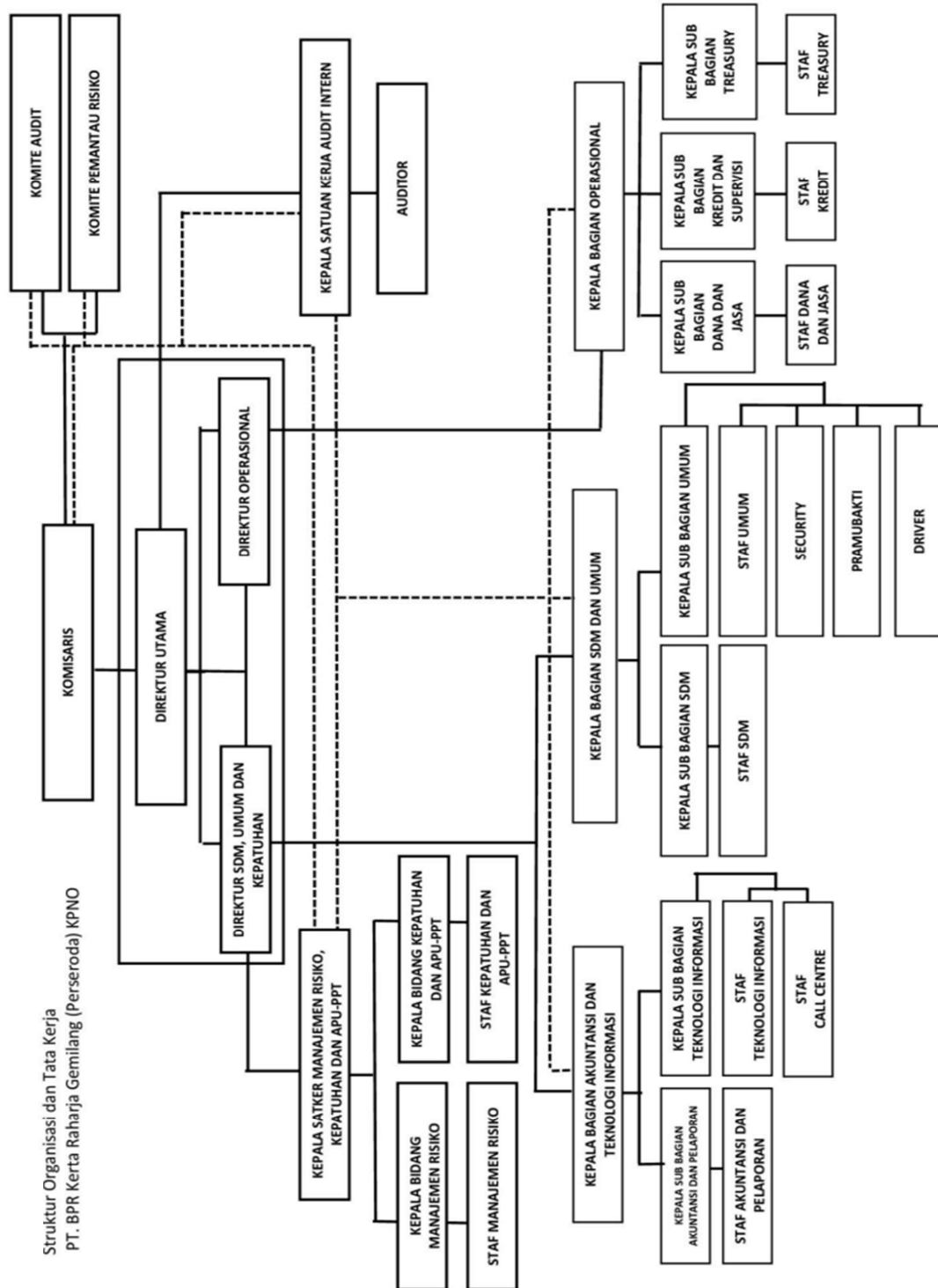
Komisaris percaya bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dengan baik. Komisaris menilai bahwa Direksi senantiasa memperhatikan arahan yang diberikan Komisaris. Hal ini diwujudkan melalui komunikasi proaktif yang terjalin melalui penyelenggaraan rapat koordinasi rutin. Komisaris memandang Direksi senantiasa menjalankan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independence* dalam menjalankan operasionalnya.

Komisaris berharap agar Direksi terus fokus pada empat hal, yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas bisnis untuk membangun fundamental yang kuat, meningkatkan efisiensi, dan berusaha untuk mencapai kepuasan nasabah. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, Komisaris yakin bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dapat memenuhi target-targetnya pada tahun 2023 maupun tahun-tahun mendatang.

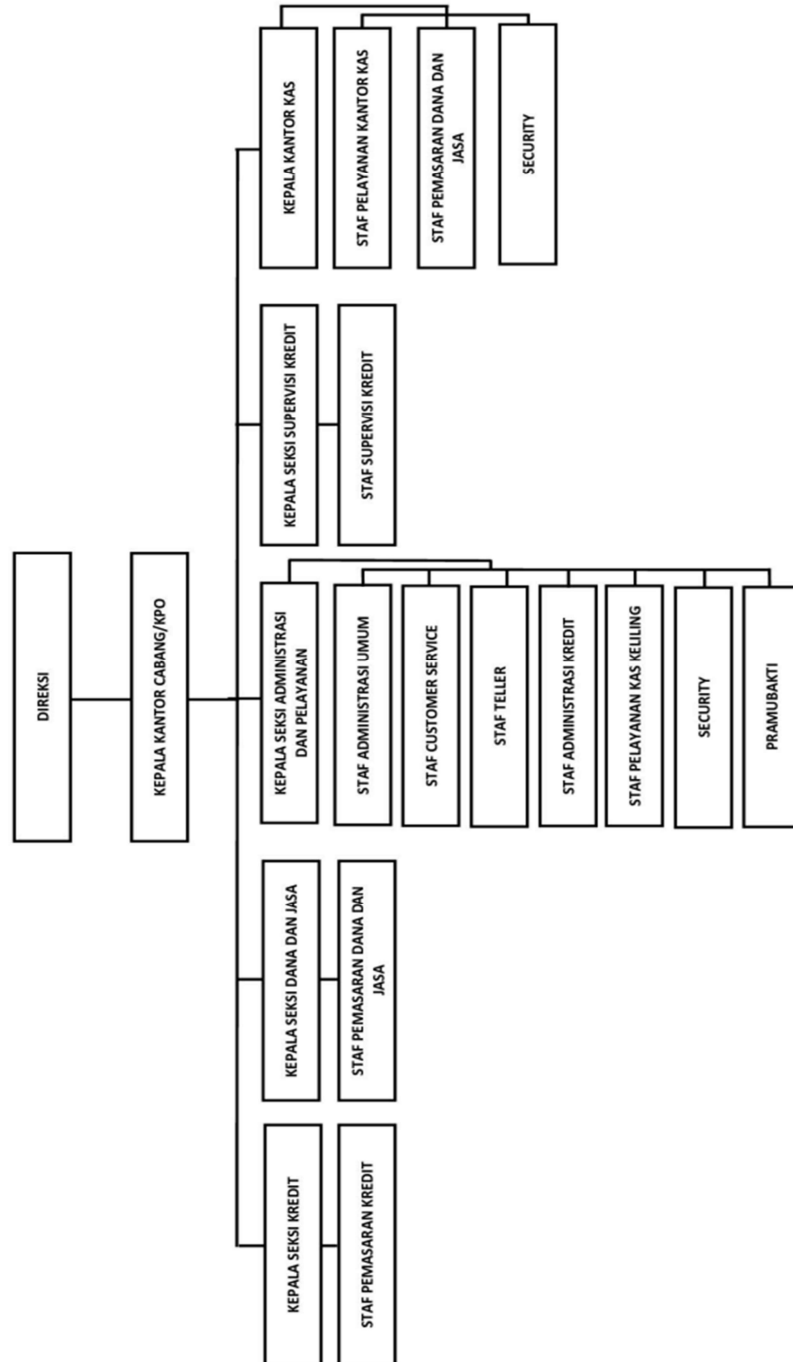
b) Struktur Organisasi;

Struktur organisasi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dirancang untuk senantiasa memenuhi tuntutan perkembangan usaha dan dengan menerapkan prinsip tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.





Lampiran III :
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroa) Kantor Cabang/KPO



c) Bidang usaha dan kegiatan utama BPR;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bergerak dalam bidang usaha keuangan/perbankan dan sebagai penggerak serta pendorong laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Dalam menjalankan usahanya PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, melakukan penempatan dana dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR);

Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab social perusahaan adalah bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap seluruh stakeholders baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perusahaan. Perusahaan memandang kegiatan CSR merupakan bagian dari kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) meningkatkan perhatian terhadap program-program CSR yang dijalankan.

Kegiatan CSR PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Sosian dilingkungan BPR Kerta Raharja dengan membagikan sembako terhadap masyarakat.
- 2) Membantu masyarakat dalam bentuk perbaikan TPU Talaga Cikupa.
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan bazaar sembako murah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
- 4) Penyerahan hewan qurban saat Hari raya Idul Adha diwilayah kerja PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
- 5) Mendukung Hari Anak Nasional dalam kegiatan Hari Menabung Nasional.

- 6) HUT Kabupaten Tangerang dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan gerobak jajanan.

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) akan terus berkomitmen untuk terus bersinergi terhadap Masyarakat sekitar yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif sehingga akan berdampak kepada keberlanjutan usaha Perusahaan untuk jangka panjang serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merencanakan untuk meningkatkan kegiatan sosialnya di tahun-tahun mendatang.

e) Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi

1) Sistem Operasional Core Banking System;

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, pada Tahun 2013 sampai dengan sekarang PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan Sistem Akuntansi Terpadu Versi 2.03 dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma). Teknologi Informasi tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan *corebanking* BPR, layanan transaksi-transaksi *online* pada setiap kantor BPR dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan layanan nasabah lainnya. Agar dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan serta pengendalian yang efektif dan efisien, maka akan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan penambahan *device* sesuai kebutuhan.

2) Sistem Keamanan;

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi *database*, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) menggunakan fasilitas Pusat Data (*data center*) dan *Disaster Recovery Center (DRC)* dari PT. Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) yang berkedudukan di Gedung German Centre, Serpong. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas utama pemrosesan data Bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional Bank secara berkesinambungan. Sedangkan *Disaster Recovery Center (DRC)* adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*DataCenter*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke

ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (*business continuity*).

3) Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi;

- a) Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam pemanfaatan System Teknologi Informasi berupa Sistem Akuntansi Terpadu (BPR SATU) Versi 2.03 dalam memenuhi kebutuhan corebanking, kebutuhan layanan transaksi online pada setiap jaringan kantor BPR, layanan mobil kas keliling, layanan transaksi payment poin dan kebutuhan layanan transaksi elektronik lainnya;
- b) Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam penggunaan sistem keamanan dalam rangka penyelenggaraan System Teknologi Informasi berupa penggunaan fasilitas pusat data (Data Center) dan pusat pemulihan data (DRC);
- c) Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka dalam mengembangkan aplikasi mobile banking (GEMA BPR) untuk memberikan layanan pembayaran dan transaksi elektronik bagi para nasabah;
- d) Kerjasama dengan Bank Permata, Bank Umum dan/atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Pembayaran lainnya dalam penyelenggaraan layanan Host to Host dan Virtual Account serta layanan elektronik lainnya.
- e) Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan layanan Call Center BPR.

4) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan Digitalisasi dilakukan melalui upaya-upaya :

- a) Membentuk struktur organisasi yang secara khusus dan independent dalam penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dalam menunjang kegiatan operasional BPR;
- b) Menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi BPR;
- c) Melakukan perluasaan kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dalam pemanfaatan system teknologi informasi berupa Sistem Akuntansi Terpadu (BPR SATU) Versi 2.03 dalam memenuhi kebutuhan

corebanking, kebutuhan layanan transaksi online pada setiap jaringan kantor BPR, layanan mobil kas keliling, layanan transaksi payment poin dan kebutuhan layanan transaksi elektronik lainnya;

- d) Melakukan Kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka dalam pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi Mobile Banking (GEMA BPR) untuk memberikan layanan pembayaran dan transaksi elektronik bagi para nasabah;
- e) Melakukan Kerjasama dengan Bank Permata, Bank Umum dan/atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Pembayaran lainnya dalam penyelenggaraan layanan Host to Host, Virtual Account dan Qris serta layanan elektronik lainnya;
- f) Menyediakan pelayanan mobil kas keliling;
- g) Menyediakan layanan Call Center BPR.
- h) Mengembangkan penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan digitalisasi yang dilakukan secara internal berkaitan dengan kegiatan layanan BPR, antara lain berupa Aplikasi Pemasaran Kredit, Aplikasi Pemasaran Tabungan dan Deposito;

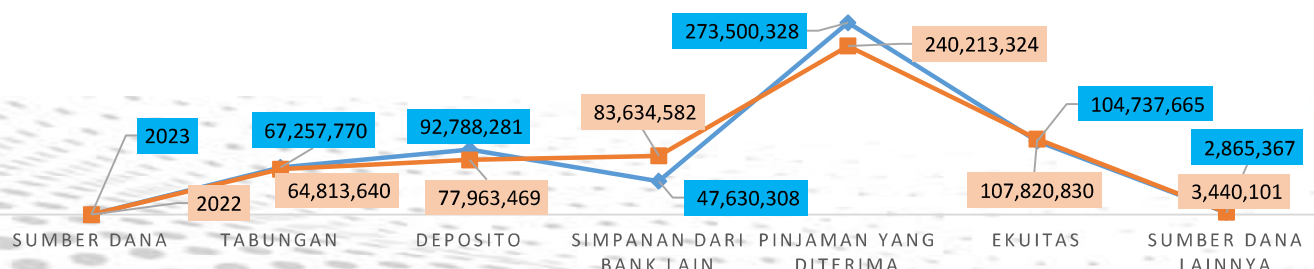
f) Perkembangan Usaha dan Target Pasar

1) Perkembangan usaha

Perkembangan usaha PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.893.772 ribu dari total asset pada tahun sebelumnya (2022) sebesar Rp.577.885.946 ribu menjadi sebesar Rp.588.779.718 ribu atau setara dengan 1.89%, dengan perkembangan komposisi sumber dana sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Sumber Dana	2023		2022		Pertumbuhan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Tabungan	67,257,770	11.42%	64,813,640	11.22%	2,444,130	3.77%
Deposito	92,788,281	15.76%	77,963,469	13.49%	14,824,811	19.02%
Simpanan dari Bank lain	47,630,308	8.09%	83,634,582	14.47%	(36,004,275)	-43.05%
Pinjaman yang diterima	273,500,328	46.45%	240,213,324	41.57%	33,287,004	13.86%
Ekuitas	104,737,665	17.79%	107,820,830	18.66%	(3,083,165)	-2.86%
Sumber dana lainnya	2,865,367	0.49%	3,440,101	0.60%	(574,733)	-16.71%
Jumlah Sumber Dana	588,779,718	100%	577,885,946	100%	10,893,772	1.89%

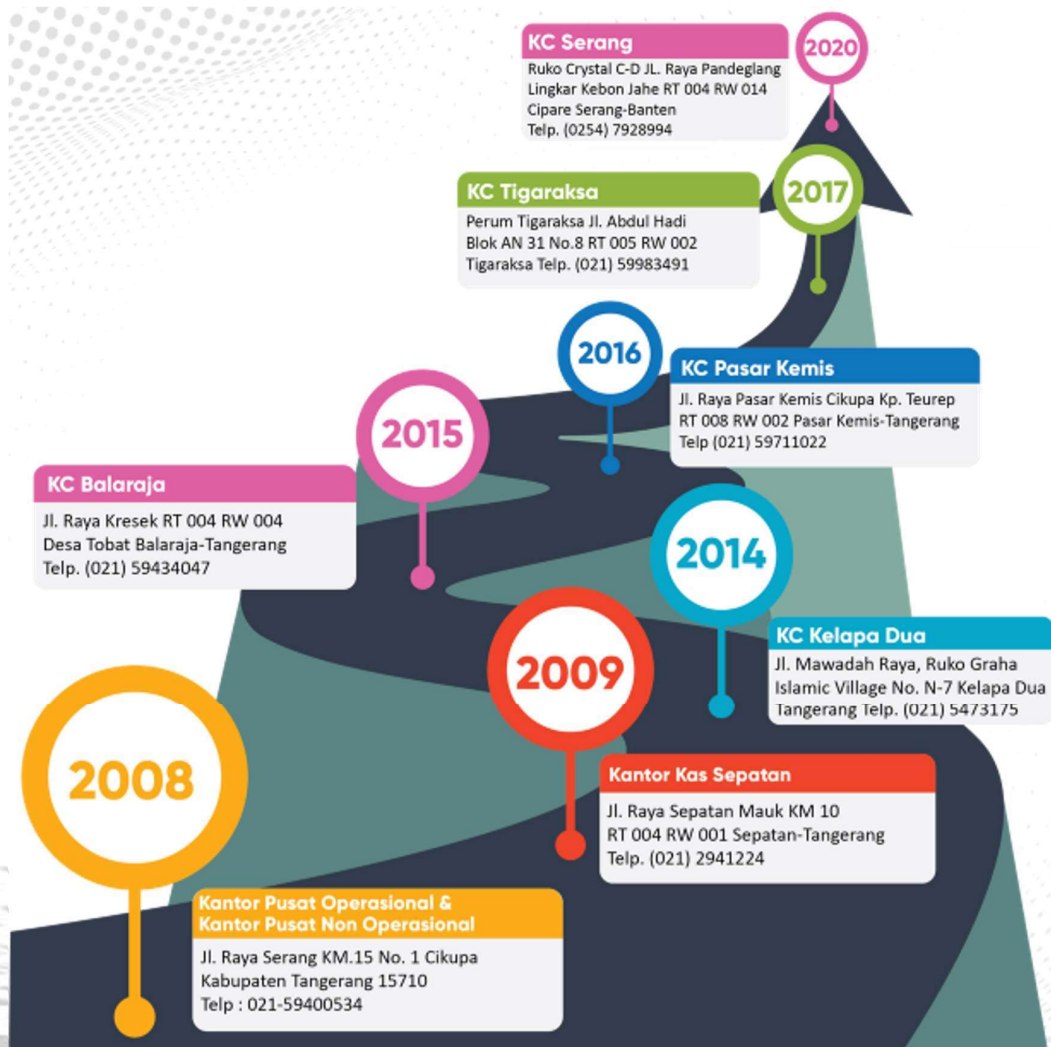


2) Target pasar

Pangsa pasar utama dalam rangka penghimpunan dana tabungan maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit masih didominasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), pangsa pasar penghimpunan dana tabungan lainnya berupa tabungan pelajar telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dan telah menjangkau para murid/siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui kerjasama langsung dengan pihak sekolah masing-masing.

3) Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor



4) Kerjasama dan Mitra Usaha

Dalam rangka meningkatkan usahanya, baik dalam rangka peningkatan sumber pendanaan maupun penyaluran dana, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah bermitra dan melakukan berbagai kerjasama antara lain :

a. Kerjasama dalam rangka penghimpunan dana :

1) Kerjasama dengan Bank Umum

Dalam kegiatan penghimpunan dana, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan bank umum dalam bentuk pinjaman. Antara lain dengan Bank BJB, Bank Banten, Bank Oke Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank J'Trust, Bank Permata, Bank Jatim, Bank Danamon, Bank DKI.

2) Kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan SMF (Sarana Multigriya Finansial) dalam bentuk pinjaman KPR (Kepemilikan Rumah).

3) Kerjasama antar BPR

Selain dengan Bank Umum, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam bentuk pinjaman yaitu dengan PT. BPR Daya Lumbung Asia dan PT. BPR Lestari. Dalam bentuk penghimpunan dana baik berupa deposito maupun tabungan. Antara lain sebagai berikut:

- a) PT. BPR Hidup Artha Graha
- b) PT. BPR Indra Candra
- c) PT. BPR Ragam Peran Mandiri
- d) PT. BPR Hidup Artha Putra
- e) PT BPR Asri Cikupa
- f) PT. BPR Daya Lumbung Asia
- g) PT. BPR Gita Makmur Utama
- h) PT. BPR DP Taspen
- i) PT. BPR Pantura Abadi
- j) PT. BPR Gamon
- k) PT. BPR Cahaya Artha Sejati
- l) PT. BPR Arthadamas Mandiri

- m) PT. BPR Athena Surya Prima
 - n) PT. BPR Bahtera Masyarakat
 - o) PT. BPR Baturaja
 - p) PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel
 - q) PT. BPR Mandiri Artha Abadi
 - r) PT. BPR Kredit Mandiri
 - s) Perumda BPR Kota Bogor
 - t) PT. BPR Amal Bhakti Sejahtera
 - u) PT. BPR Muara Sumber Dana
 - v) Perumda BPR Bank Jogja
 - w) PT. BPR Central Sejahtera
 - x) PT. BPR Karya Artha Sejahtera
 - y) PT. BPR Sleman Perseroda
 - z) PT. BPR Supra Artapersada
 - aa) PT. BPR Bringin Dana Sejahtera
 - bb) PT. BPR Bumidhana
 - cc) PT. BPR Kerta Raharja Perseroda
 - dd) PT. BPR Delta Artha Perseroda
 - ee) PT. BPR Harapan Saudara
- 4) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan
- PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah bekerjasama dengan 565 sekolah tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA di wilayah Kabupaten Tangerang dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- 5) Kerjasama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Kerjasama dalam rangka penghimpunan dana juga dilakukan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain dengan PT. BPR Berkah (Perseroda), PT. BPR Serang (Perseroda), PD. Pasar Niaga Kerta Raharja, PT. LKM Artha Kerta Raharja, PT. Mitra Kerta Raharja, PDAM Tirta Kerta Raharja.
- 6) Kerjasama dengan Perusahaan Asuransi
- Dalam kegiatan penghimpunan dana PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam bentuk

Tabungan dan Deposito antara lain dengan PT. Jamkrida Banten, PT. Asuransi Bangun Askrida.

7) Kerjasama Lainnya

Kerjasama penghimpunan dana juga dilakukan dengan pihak-pihak lainnya dalam bentuk deposito maupun tabungan.

b) Kerjasama dalam rangka penyaluran dana

Kerjasama dalam rangka penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit, antara lain:

- 1) Kerjasama Program Penjaminan Kredit kepada pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) dilakukan melalui PT. Jamkrida Banten yang meliputi jumlah seluruh penyaluran kredit kepada para pelaku usaha (UMKM) sebanyak 653 rekening yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang;
- 2) Kerjasama dengan beberapa Koperasi Simpan Pinjam dalam rangka penyaluran kredit kepada para pelaku usaha (UMKM) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten;
- 3) Kerjasama antar BPR dalam rangka linkage program dalam penyaluran kredit kepada para pelaku usaha (UMKM) di wilayah Provinsi Banten;
- 4) Kerjasama pemberian kredit dilakukan dengan SKPD/BLUD di wilayah Provinsi Banten, antara lain sebagai berikut :
 - a) Kerjasama pemberian kredit dengan 147 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - b) Kerjasama pemberian kredit dengan 26 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - c) Kerjasama pemberian kredit dengan 30 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - d) Kerjasama pemberian kredit dengan 32 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - e) Kerjasama pemberian kredit dengan 36 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 - f) Kerjasama pemberian kredit dengan 13 SKPD/BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

c) Kerjasama lainnya

Dalam menunjang kegiatan operasional PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain :

- 1) PT. Selaras Karya Dinamika Unggul (Sekardiu)
Pada tahun 2022 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan Kerjasama dengan Sekardiu dalam penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai.
- 2) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
Pada tahun 2018 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan LPPI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 3) PT. Damarindo
Pada akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) melakukan kerjasama dengan PT. Damarindo Mandiri untuk pegawai outsorching.
- 4) PT. Telkom Sigma
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) bekerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom sigma) sebagai penyedia jasa teknologi informasi.
- 5) Asosiasi BPR
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) juga bekerjasama dengan Perbarindo dan Perbamida dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 6) Perusahaan Asuransi
Kerjasama dengan pihak asuransi juga dilakukan dalam rangka penjaminan kredit debitur antara lain PT. Jamkrida Banten.
- 7) Bank Umum
Kerjasama dengan Bank Umum dilakukan dalam rangka pendebetan rekening untuk pembayaran angsuran kredit, yaitu dengan PT. Bank BJB dan PT. Bank Banten.

g) Kepemilikan dalam kelompok usaha BPR

Seluruh Direksi dan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) maupun pada BPR lain yang dimiliki oleh para pemegang saham.

h) Keterkaitan

Keterkaitan antar pemegang saham, Direksi atau Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan Direksi dan/atau Komisaris, meliputi:

a. Keterkaitan dalam kepemilikan

- 1) Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai pemegang saham mayoritas PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), saat ini memiliki saham sebesar 79,34% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);
- 2) Pemerintah Provinsi Banten saat ini memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) Pemegang saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen);
- 4) PT. Bank Jabar Banten memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua persen);
- 5) Keterkaitan dalam kepemilikan BPR dan kelompok usaha BPR tersebut meliputi:

dalam ribuan rupiah

Pemegang Saham	Kepemilikan Modal		Kepemilikan Modal dalam Kelompok Usaha BPR		
	Rp.	%	Kepemilikan BPR Lain	Rp0.00	%
Pemkab. Tangerang	198,350,000	79.34%		-	0.00%

b. Keterkaitan dalam kepengurusan

Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BPR lain paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Direksi dan Komisaris BPR yang berangkutan, adalah sebagai berikut:

- 2) Bangbang Purnawan saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. BPR Hariarta Sedana.
- 3) Beni Subarsyah saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. BPR Baleendah Rahayu.

4) Antara Direksi dan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

c. Keterkaitan dalam kepemilikan dan kepengurusan

- 1) Pemerintah Kabupaten Tangerang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama :
 - a) Tidak memiliki saham pada badan usaha lain yang dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris;
 - b) Memiliki saham dengan jumlah kurang dari 10% (sepuluh persen) pada PT. Bank BJB yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - c) Memiliki saham secara mayoritas pada Perusahaan Daerah lainnya, antara lain PD. Pasar Niaga Kerta Raharja dan PT. LKM Artha Kerta Raharja dan PDAM Tirta Kerta Raharja yang saat ini menjadi nasabah deposan dan penabung pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero).
- 2) Direksi dan/atau Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham pada badan usaha lain yang dimiliki oleh para pemegang saham.

i) Sumber daya manusia

a. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pengurus

TINGKAT PENDIDIKAN PENGURUS	JUMLAH PEGAWAI	
	2023	2022
a. Komisaris	3	3
- S2	2	2
- S1	1	1
b. Direksi	3	3
- S2		
- S1	3	3

b. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI	
	2023	2022
a. Komite	2	2
- S2	1	1
- S1	1	1
- D3		
- SLTA		
b. Pejabat Eksekutif	12	11
- S2	1	1
- S1	11	10
- D3		
- SLTA		
c. Kepala Seksi	35	36
- S2		
- S1	26	27
- D3	5	5
- SLTA	4	4
d. Staf	109	115
- S2		
- S1	61	63
- D3	6	6
- SLTA	42	46
- SLTP		
e. TKK WT	6	6
- SLTA	5	5
- SMP	1	1
e. Tenaga Alih Daya	26	26
- SLTA	26	26
- SMP		
JUMLAH PEGAWAI	190	196

c. Pendidikan dan pengembangan SDM

Pendidikan dan pengembangan selama tahun 2023 yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai yang diikuti
1	Bidang Marketing Kredit	18	169
2	Bidang Marketing Dana	7	72
3	Bidang Supervisi dan Administrasi Kredit	11	48
4	Bidang SDM dan Umum	15	97
5	Bidang Akuntansi Pelaporan dan TI	19	97
6	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	10	52
7	Bidang Lainnya	21	254
Jumlah		101	789

j) Kebijakan Remunerasi

Penghasilan dan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, meliputi :

a. Penghasilan Direksi, terdiri dari :

- 1) Gaji pokok Direktur Utama yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
- 2) Gaji pokok Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- 3) Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
- 4) Tunjangan istri/suami dan anak;
- 5) Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- 6) Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR;
- 7) Tunjangan Hari Raya sesuai dengan kemampuan BPR;

b. Fasilitas yang didapat Direksi:

- 1) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR;
- 2) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
- 3) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR serta dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas;
- 4) Setiap tahun Direksi mendapatkan Tantiem sebesar 4% yang didapat dari hasil laba bersih akhir tahun dikalikan jumlah secara proporsional;
- 5) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) untuk total semua pengurus dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa

jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama;

- 6) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

c. Penghasilan Komisaris, terdiri dari :

- 1) Komisaris Utama, diberikan honorarium paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- 2) Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- 3) Komisaris diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR dan diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR dengan syarat Dewan pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya;
- 4) Komisaris dapat diberikan uang tatiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- 5) Komisaris mendapatkan uang transportasi setiap kedatangan.
- 6) Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan sebagaimana penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1.

k) **Perubahan Penting Lainnya**

Pada Tahun 2023 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak terdapat perubahan penting lainnya.

Bagian Kedua

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN & OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

Payment Point



GO DIGITAL

BANK KERTA
PT BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSEROA)



GEMILANG ONLINE
Financial Access - - - -

www.bprkertaraharja.com

[f bprkgemilang](https://www.facebook.com/bprkgemilang)

[i bprkgemilang](https://www.instagram.com/bprkgemilang)

[y bprkgemilang](https://www.youtube.com/bprkgemilang)



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

PT Bank Perkreditan Rakyat
Kerta Raharja Gemilang (Persero)
Laporan Keuangan
31 Desember 2023 dan
Untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
serta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

	Halaman
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ai Suherlan, SE
Alamat kantor : Jl. Raya Serang KM.15 No. 1 Desa Talagasari RT/RW 002.001 Kecamatan. Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
Alamat rumah : Komp. RSS Pemda Blok C No. 6 Kel. Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
No Telp : 08129357926
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Uus Mustaudie, SE
Alamat kantor : Jl. Raya Serang KM.15 No. 1 Desa Talagasari RT/RW 002.001 Kecamatan. Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
Alamat rumah : Kp. Kopibera RT/RW 003/003 Kel. Cinangka Kec. Cinangka Kabupaten Serang
No Telp : 0818979655
Jabatan : Direktur Operasional
3. Nama : Deni Setia Wahyudi, SE
Alamat kantor : Jl. Raya Serang KM.15 No. 1 Desa Talagasari RT/RW 002.001 Kecamatan. Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
Alamat rumah : Kp. Long Jaha RT/RW 001/007 Kel. Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang
No Telp : 087871777477
Jabatan : Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) per 31 Desember 2023;
2. Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang, 19 Februari 2024





Uus Mustaudie, SE
Direktur Operasional

Ai Suherlan, SE
Direktur Utama

Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang
Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM. 15 No. 1 Desa Talagasari RT/RW. 002/001 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
Telp. (021) 59400534, Fax. (021) 59400283, Email : bprkertaraharja@yahoo.co.id, Website : www.bprkertaraharja.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00018/2.0923/AU.2/07/0005-1/1/II/2024

Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham
**PT Bank Perkreditan Rakyat
Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)**
Kabupaten Tangerang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) per 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya No. LAI 00013/3.0410/AU.2/07/1624-1/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPR.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPR untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPR tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Dr. Sabar, SE., M.Ak., Ak., CA., CPL., CPA., ASEAN CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP.0005
Izin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

19 Februari 2024



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
NERACA
31 Desember 2023**

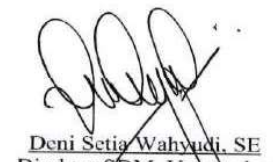
A S E T

	Catatan	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kas	2c,3	3.185.294.500	4.210.524.500
Pendapatan bunga yang akan diterima	3e,4	3.442.497.227	2.826.101.099
Penempatan pada bank lain	2d,2g,5		
Giro		43.519.985.349	70.001.093.803
Tabungan		8.396.576.465	18.929.927.875
Deposito		56.843.804.977	37.277.145.833
Penempatan pada bank lain		108.760.366.791	126.208.167.511
Penyisihan kerugian penempatan dana		(341.697.609)	(176.801.301)
Jumlah		108.418.669.182	126.031.366.210
Kredit yang diberikan	2f,2g,6,30		
Jumlah kredit yang diberikan		479.592.674.216	447.479.475.049
Penyisihan kerugian kredit		(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Bersih		468.133.319.436	438.063.549.238
Aset tetap	2h,7		
Biaya perolehan		17.034.618.414	17.170.672.664
Akumulasi penyusutan		(12.232.143.163)	(11.653.193.993)
Nilai buku		4.802.475.251	5.517.478.671
Aset tak berwujud - bersih	8	32.375.000	43.475.000
Aset lain-lain	2i,9	765.087.165	1.193.451.184
JUMLAH ASET		588.779.717.761	577.885.945.903

Tangerang, 19 Februari 2024


Uus Mustaudi, SE
Direktur Operasional


Ai Suherlan, SE
Direktur Utama


Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2023**

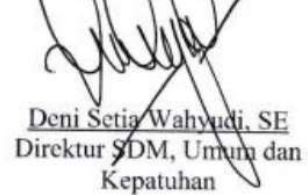
KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	2j,10	901.837.234	938.495.187
Utang bunga	2k,11	1.223.114.218	1.200.592.847
Utang pajak	12a	189.440.808	711.643.541
Simpanan	2m,13,30	160.046.050.226	142.777.109.148
Simpanan dari bank lain	2m,14	47.630.307.568	83.634.582.302
Pinjaman yang diterima	2q,15	273.500.327.656	240.213.323.964
Kewajiban imbalan kerja	16	201.136.813	343.065.394
Kewajiban lain-lain	17	349.838.194	246.303.702
Jumlah kewajiban		484.042.052.717	470.065.116.085
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	2n,18	71.650.000.000	71.650.000.000
Saldo laba			
Cadangan	2n,19	28.536.506.913	26.627.926.187
Belum ditentukan tujuannya		4.551.158.131	9.542.903.632
Jumlah ekuitas		104.737.665.044	107.820.829.818
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		588.779.717.761	577.885.945.903

Tangerang, 19 Februari 2024


Uus Mustaudi, SE
Direktur Operasional


Ai Sulherlan, SE
Direktur Utama


Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan
Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023**

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan bunga:			
Bunga kontraktual	20,21	81.131.424.349	77.196.339.110
Provisi dan administrasi	20,21	5.924.573.552	4.882.689.775
Jumlah pendapatan bunga		87.055.997.901	82.079.028.885
Beban bunga	2p,22	(37.097.328.587)	(32.218.746.431)
Pendapatan bunga, bersih		49.958.669.314	49.860.282.454
Pendapatan operasional lainnya	20,23	2.872.683.910	9.017.150.685
Beban operasional:			
Beban penyisihan kerugian aset produktif	24	(4.126.531.528)	(6.262.266.948)
Beban penyusutan dan amortisasi	25	(1.363.059.470)	(1.295.011.050)
Beban pemasaran	26	(812.785.434)	(769.211.556)
Beban administrasi dan umum	27	(40.555.499.194)	(38.390.497.147)
Jumlah beban operasional		(46.857.875.626)	(46.716.986.701)
Laba operasional		5.973.477.598	12.160.446.439
Pendapatan (beban) non operasional :			
Pendapatan non operasional	28	409.062.242	521.846.932
Beban non operasional	28	(491.467.529)	(447.801.719)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(82.405.287)	74.045.213
Laba sebelum pajak penghasilan		5.891.072.311	12.234.491.652
Pajak penghasilan :			
Kini	21,12a	(1.339.914.180)	(2.691.588.020)
Laba bersih tahun berjalan		4.551.158.131	9.542.903.632

Tangerang, 19 Februari 2024


Uus Mustaudi, SE
Direktur Operasional


A. Suherlan, SE
Direktur Utama


Deni Setia Wahyudi, SE
Direktur SDM, Umum dan
Kepatuhan

**Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023**

	Modal disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum ditentukan tujuannya	Jumlah ekuitas
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2021	71.650.000.000	9.656.459.440	15.450.335.103	7.605.658.217	104.362.452.760
Pembagian dividen	—	—	—	(4.183.112.019)	(4.183.112.019)
Pembentukan (penggunaan) cadangan	—	760.565.822	760.565.822	(1.521.131.643)	—
Pembagian dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan CSR	—	—	—	(1.901.414.555)	(1.901.414.555)
Laba bersih tahun berjalan	—	—	—	9.542.903.632	9.542.903.632
Saldo per 31 Desember 2022	71.650.000.000	10.417.025.262	16.210.900.925	9.542.903.632	107.820.829.819
Pembagian dividen	—	—	—	(5.248.596.998)	(5.248.596.998)
Pembentukan (penggunaan) Cadangan	—	954.290.363	954.290.363	(1.908.580.726)	—
Pembagian dana kesejahteraan, jasa produksi, tantiem, dan CSR	—	—	—	(2.385.725.908)	(2.385.725.908)
Laba bersih tahun berjalan	—	—	—	4.551.158.131	4.551.158.131
Saldo per 31 Desember 2023	71.650.000.000	11.371.315.625	17.165.191.288	4.551.158.131	104.737.665.044

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023**

	2023	2022
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih tahun berjalan	4.538.943.103	9.542.903.632
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	1.363.059.471	762.486.050
Penyisihan penghapusan (pemulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain	164.896.308	10.839.875
Kredit yang diberikan	2.853.665.442	(2.348.245.775)
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	8.147.554.024	7.967.983.782
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan penempatan pada bank lain	17.447.800.720	9.163.722.094
Kenaikan pendapatan bunga yang akan diterima	(616.396.128)	(140.014.496)
Kenaikan kredit yang diberikan	(32.923.435.639)	(58.802.752.390)
Penurunan (kenaikan) aset lain-lain	428.364.019	(775.687.198)
Penurunan kewajiban segera	(41.753.843)	(1.368.538.228)
Kenaikan utang bunga	22.521.371	37.584.309
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(492.986.513)	412.558.014
Kenaikan simpanan	17.268.941.078	18.266.227.698
Penurunan impanan dari bank lain	(36.004.274.734)	(8.781.619.596)
Kenaikan pinjaman yang diterima	33.287.003.692	42.103.370.088
Penurunan kewajiban imbalan kerja	(141.928.581)	—
Kenaikan kewajiban lain-lain	91.629.190	164.031.285
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	6.473.038.656	8.246.865.362

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023**

	2022	2021
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap inventaris	(636.956.050)	(77.955.388)
Pembelian aset tak berwujud	-	(42.975.000)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas investasi	136.054.250	(120.930.388)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penambahan cadangan	1.908.580.726	1.521.131.643
Pembagian dividen	(5.248.596.998)	(4.183.112.019)
Pembagian dana kesejahteraan dan jasa produksi	(2.385.725.908)	(1.901.414.555)
Penggunaan cadangan	(1.908.580.726)	(1.521.131.643)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7.634.322.906)	(6.084.526.574)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(1.025.230.000)	(2.041.408.400)
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.210.524.500	2.169.116.100
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.185.294.500	4.210.524.500

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), dahulu merupakan PD Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Dasar perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Saham atas Perubahan Badan Hukum
BPR melakukan perubahan badan hukum berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 4 September 2020 tentang persetujuan perubahan badan hukum dan nama PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).
2. Persetujuan Prinsip
BPR mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 241/DIR/BPR-KR/IX/2020 tanggal 22 September 2020. Perubahan badan hukum tersebut dari PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor S-196/KR.011/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Perubahan badan hukum BPR mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang.
4. Perubahan Badan Hukum
Berdasarkan akta nomor 23 notaris Harsono, SH, tanggal 23 Desember 2020, tentang pendirian perseroan terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0069155.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 23 Desember 2020. Berdasarkan akta tersebut, maka PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) resmi didirikan, namun belum dilakukan pengalihan izin usaha sebagai dari PD BPR Kerta Raharja. Sehingga badan hukum baru tersebut belum beroperasi secara komersil pada tahun 2020.
5. Pengalihan Izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru
BPR mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dengan surat nomor 011/DIR/BPR-KR/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal permohonan pengalihan izin usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru. Permohonan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/KR.011/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal persetujuan permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, PD BPR Kerta Raharja menjadi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Dengan telah diterbitkannya surat persetujuan pengalihan izin usaha dari OJK, maka sejak tanggal 2 Maret 2021 BPR efektif melakukan kegiatan usahanya melalui badan hukum baru dengan nama PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Pengalihan izin usaha ini juga berdampak terhadap laporan keuangan, dimana BPR akan melakukan pengalihan hak dan kewajiban yang tersaji dalam laporan keuangan dari Badan Hukum Lama (PD BPR Kerta Raharja) kepada Badan Hukum Baru PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda).

b. Maksud dan Tujuan

PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) ("BPR") didirikan dengan maksud dan tujuan Untuk menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan rakyat melalui aktivitasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, dan beroperasi dengan system imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

c. Kedudukan Kantor

PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 15 No.1 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten serta mempunyai; 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 5 (lima) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Kas, sebagai berikut:

Kantor Cabang :

1. Kantor Cabang Kelapa Dua
2. Kantor Cabang Balaraja
3. Kantor Cabang Pasar Kemis
4. Kantor Cabang Tigaraksa
5. Kantor Cabang Serang

Kantor Kas:

1. Kantor Kas Sepatan

d. Kepengurusan

Berdasarkan akta Nomor 63 yang dibuat oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn., tanggal 23 September 2022, yang telah tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0059244 tanggal 27 September 2022, susunan pengurus PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

1. UMUM (Lanjutan)

d. Kepengurusan (Lanjutan)

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris Independen	: Beni Subarsyah, SE., MM.
Komisaris Independen	: Ir. Bangbang Purnawan, MM.

Direksi:

Direktur Utama	: Ai Suherlan, SE.
Direktur Operasional	: Uus Mustaudie, SE.
Direktur SDM, Umum dan Ketaatan	: Deni Setia Wahyudi, SE.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi BPR berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR).

Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan:

- a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar.
- b) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian arus kas dan setara kas didefinisikan sebagai jumlah-jumlah yang terkandung di neraca sebagai akun kas, giro Bank Indonesia serta giro pada Bank lain.

Kecuali untuk penempatan dalam bentuk giro, saldo penempatan pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan kerugian (*offsetting account*).

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Mata Uang Pelaporan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013, Mata Uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp).

c. Kas

Kas yaitu uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk dalam pos ini adalah kas besar, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain yaitu jumlah dana setiap penempatan BPR pada bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dan pada BPR lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Saldo penempatan pada bank lain tidak dapat disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank.

Kecuali untuk penempatan dalam bentuk giro, Saldo penempatan pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan kerugian (*offsetting account*).

e. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Kredit yang diberikan

Kredit yaitu kredit yang diberikan oleh BPR baik kepada bank atau pihak ketiga bukan bank sebesar baki debet neto yaitu baki debet dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi dan ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam hal terdapat pendapatan ditangguhkan dan kerugian restrukturisasi maka nilai yang dimasukkan setelah memperhitungkan pendapatan ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi dan cadangan kerugian restrukturisasi. Pos kredit yang diberikan dibedakan untuk kredit kepada BPR, kepada Bank Umum, kepada non Bank - Pihak terkait, dan kepada non Bank - Pihak tidak terkait. Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/ konsorsium/ sindikasi, baik BPR bertindak sebagai bank induk (*arranger*) maupun sebagai bank peserta (*participant*), dimasukkan pada pos ini sebesar porsi tagihan BPR kepada debitur yang bersangkutan. Kredit yang diberikan dalam rangka *channeling* dimana BPR tidak memiliki risiko kredit tak tertagih tidak dimasukkan pada pos ini melainkan pada Rekening Administratif.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Kredit yang diberikan (Lanjutan)

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima. Bunga kredit *non-performing* diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

g. Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian/Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) serta estimasi komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan aset produktif adalah penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan/penempatan.

BPR membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Adapun besarnya pembentukan penyisihan untuk masing-masing aset produktif menurut POJK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Cadangan Umum :

0,15% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar.

Cadangan Khusus :

- a) 3% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan (Perlakuan berlaku sejak Desember 2021).
- b) 10% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
- c) 50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan.
- d) 100% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Macet.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagai berikut:

- a) 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
- b) 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- c) 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia. 70 (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Penyisihan Kerugian (Lanjutan)

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagai berikut: (Lanjutan)

- d) 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e) 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f) 50%, (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
- g) 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atas pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
- h) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- j) 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
- k) 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan
- l) 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan undang-undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Agunan selain yang dimaksud pada ketentuan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

h. Aset Tetap dan Inventaris

Aset Tetap dan Inventaris yaitu aset berwujud fisik yang dimiliki BPR dan digunakan untuk kegiatan operasional. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Aset Tetap dan Inventaris (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran umur pemakaian aset tetap, yaitu:

Kelompok Harta Berwujud	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif penyusutan (Per Tahun)
I. Bukan Bangunan		
- Kelompok 1	4	25%
- Kelompok 2	8	12,50%
- Kelompok 3	16	6,25%
- Kelompok 4	20	5%
II. Bangunan Permanen		
- Permanen	20	5%
- Tidak Permanen	10	10%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan Laba-Rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain yaitu nilai perolehan aset lainnya yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Termasuk dalam pos ini antara lain pajak/biaya dibayar dimuka, piutang kepada perusahaan asuransi, *commemorative coins/notes* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, saldo mata uang rupiah dan asing yang telah ditarik dari peredaran namun masih dalam masa tenggang penukaran, dan lainnya.

j. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar antara lain: pajak, biaya yang masih harus dibayar, titipan dan lainnya.

k. Utang Bunga

Utang Bunga yaitu akrual bunga untuk produk simpanan (tabungan/deposito), pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi, baik dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ditentukan berdasarkan pendapatan yang sudah melebihi angka Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar), berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai dengan peraturan perpajakan tarif yang dikenakan adalah 22% sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku pada tahun 2020.

m. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana Tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

1. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

2. Deposito

Deposito yaitu simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nilai yang dimasukkan sebesar saldo tabungan nasabah setelah dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

n. Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Ekuitas terdiri dari:

1. Modal Dasar, yaitu jumlah modal BPR yang tercantum dalam anggaran dasar BPR.
2. Modal Disetor, yaitu dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR dan telah didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
3. Dana Setoran Modal, yaitu dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Ekuitas (Lanjutan)

4. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pos ini dirinci atas:

- a) Cadangan Tujuan
Cadangan Tujuan yaitu bagian laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- b) Cadangan Umum
Cadangan Umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- c) Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuan Penggunaannya
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuan Penggunaannya yaitu laba BPR pada periode tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota belum diputuskan penggunaannya, rugi BPR pada periode lalu, laba tahun berjalan, dan rugi tahun berjalan.

o. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha utama BPR yang terdiri atas:

1) Pendapatan Bunga

Yang termasuk dalam akun ini adalah pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan oleh BPR dalam bentuk aset produktif antara lain SBI, penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank. Termasuk yang dimasukkan dalam pos ini adalah amortisasi diskonto, provisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset produktif.

Pendapatan bunga dirinci atas:

- a) Bunga Kontraktual
Pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan kontrak dengan pihak lain atas SBI, penempatan dana / kredit yang diberikan pada bank dan pihak ketiga bukan bank, tidak termasuk amortisasi provisi / biaya transaksi.
- b) Amortisasi Provisi
Pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan provisi kredit dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip SAK ETAP.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Pendapatan Operasional (Lanjutan)

2) Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas utama BPR, selain dari pendapatan bunga.

p. Beban Bunga

Beban Bunga adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR, dan dirinci atas:

1) Bunga Kontraktual

Yang dimasukkan dalam pos ini adalah beban bunga yang secara kontraktual diperjanjikan oleh BPR kepada bank lain atau pihak ketiga bukan bank. Beban bunga kontraktual tidak termasuk amortisasi biaya transaksi (*transaction cost*).

2) Amortisasi Biaya Transaksi

Biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan dana pada SBI, penempatan dana pada bank lain serta kredit yang diberikan kepada bank lain dan pihak ketiga bukan bank. Pengakuan biaya transaksi dilakukan secara amortisasi sebagaimana diatur dalam prinsip SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

q. Imbalan Kerja

BPR telah mengakui dan menyajikan biaya dan kewajiban imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, dan pascakerja di dalam laporan keuangannya, berdasarkan ketentuan dalam SAK-ETAP Bab 23, serta Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat Bab V angka 9 tentang Akuntansi Kewajiban Imbalan Kerja.

3. KAS

	2023 Rp	2022 Rp
Kantor Pusat Operasional	541.001.000	744.548.100
Kantor cabang Kelapa Dua	403.387.400	828.950.300
Kantor cabang Tigaraksa	455.204.400	938.150.900
Kantor cabang Balaraja	721.756.300	796.491.900
Kantor cabang Pasar Kemis	482.133.400	584.588.300
Kantor cabang Serang	581.812.000	317.795.000
Jumlah	3.185.294.500	4.210.524.500

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

3. KAS (Lanjutan)

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Jasaraharja Putera (*JP Insurance*) terhadap risiko kebongkaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 10.580.000.000, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas kas yang dipertanggungkan.

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pendapatan bunga kredit	3.362.111.285	2.781.530.571
Pendapatan bunga penempatan pada bank lain	80.385.942	44.570.528
Jumlah	<u>3.442.497.227</u>	<u>2.826.101.099</u>

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Giro :		
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	13.287.036.196	10.781.476.485
PT. Bank Permata, Tbk	8.960.595.522	9.411.052.917
PT Bank CIMB Niaga, Tbk (<i>Escrow Account</i>)	8.502.737.914	10.216.503.496
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.835.558.580	13.006.574.761
PT BPD Banten, Tbk	2.587.782.193	4.402.402.111
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	2.215.814.284	11.093.193.580
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.046.693.862	3.861.600.785
PT BPD DKI	960.804.888	5.087.944.000
PT Bank Oke Indonesia, Tbk	602.867.672	1.010.703.499
PT Bank JTRUST Indonesia, Tbk	574.063.542	268.518.602
PT Bank OCBC NISP, Tbk	369.938.613	370.322.732
PT BPD Jatim	318.476.345	236.604.891
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	255.615.738	254.195.944
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.000.000	—
Jumlah giro pada bank lain	<u>43.519.985.349</u>	<u>70.001.093.803</u>
Tabungan :		
PT Bank Permata, Tbk	5.552.804.689	16.695.050.022
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	2.124.498.285	1.861.136.859
PT BPR Lestari Banten	645.181.916	373.740.994
PT BPR Intan Jabar	74.091.575	—
Jumlah tabungan pada bank lain	<u>8.396.576.465</u>	<u>18.929.927.875</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	2023 Rp	2022 Rp
Deposito :		
PT BPD Banten, Tbk	17.755.000.000	5.755.000.000
PD BPR Berkah	8.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Muammalat Indonesia, Tbk	4.000.000.000	7.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	4.000.000.000	—
PT Bank JTRUST Indonesia, Tbk	3.500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Syariah Lampung	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Artha Sedana	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Harta Insan Karimah	2.000.000.000	—
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	1.688.804.977	972.145.833
PT Bank Oke Indonesia, Tbk	1.500.000.000	4.650.000.000
PT BPR Baturaja	1.500.000.000	500.000.000
PT BPD DKI	1.250.000.000	1.250.000.000
PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Lestari Banten	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Rasyid	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS PNM Mentari	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPRS Bina Amwalul Hasanah	1.000.000.000	—
PT BPR Intan Jabar	750.000.000	750.000.000
PT BPR Daya Lumbung Asia	750.000.000	750.000.000
PT BPR Amal Bhakti	500.000.000	500.000.000
PT BPR Parung	300.000.000	300.000.000
PT BPR Wibawa Mukti Jabar	250.000.000	250.000.000
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	100.000.000	100.000.000
Perumda BPR Kuningan	—	1.000.000.000
Jumlah deposito	<u>56.843.804.977</u>	<u>37.277.145.833</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	108.760.366.791	126.208.167.511
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(341.697.609)	(176.801.301)
Jumlah	<u>108.418.669.182</u>	<u>126.031.366.210</u>

Tingkat suku bunga penempatan pada bank lain sebagai berikut:

	2023 %	2022 %
Giro	0 - 2	0 - 2
Tabungan	1 - 2	1 - 2
Deposito	2 - 8	2 - 8

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal tahun	176.801.301	165.961.426
Penyisihan kerugian – tahun berjalan	526.773.803	135.894.682
Pemulihan kerugian – tahun berjalan	(361.877.495)	(125.054.807)
Saldo akhir tahun	<u>341.697.609</u>	<u>176.801.301</u>

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR pada tanggal pelaporan, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2023 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis kredit

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Kredit Multiguna	232.541.479.157	276.303.888.760
Kredit Multiguna Flat	11.666.667	19.979.353
Kredit KPT Sertifikasi	14.397.047.490	12.394.686.629
Kredit Guna Bhakti / Pegawai Intern	4.338.379.165	7.804.820.357
Kredit Multi Lembaga Usaha	3.074.435.595	14.995.427.518
Kredit Multi Usaha	2.127.698.761	2.142.949.012
Kredit Penghasilan Tetap	40.381.614.208	37.680.946.662
Kredit Mikro Raharja	2.286.461.461	2.825.373.960
Kredit Guna Bhakti I	16.239.253.936	6.578.904.728
Kredit Multi Guna Payroll	173.819.645.055	95.547.268.877
Jumlah	<u>489.217.681.495</u>	<u>456.294.245.855</u>
Provisi kredit	(9.619.616.222)	(8.418.617.317)
Administrasi dan biaya transaksi	(5.391.057)	49.403.358
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	<u>–</u>	<u>(445.556.847)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	479.592.674.216	447.479.475.049
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian kredit	(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Jumlah bersih	<u>468.133.319.436</u>	<u>438.063.549.238</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Perdagangan	3.183.778.168	3.626.892.714
Jasa-jasa	4.779.616.798	4.029.898.976
Perindustrian	8.616.766	8.616.936
Lainnya	481.245.669.763	448.628.837.229
Jumlah	489.217.681.495	456.294.245.855
Provisi kredit	(9.619.616.222)	(8.418.617.317)
Administrasi dan biaya transaksi	(5.391.057)	49.403.358
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	—	(445.556.847)
Jumlah kredit yang diberikan	479.592.674.216	447.479.475.049
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian kredit	(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Jumlah bersih	468.133.319.436	438.063.549.238

c. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Sampai dengan 1 tahun	5.441.551.037	6.543.191.533
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	23.729.358.103	34.098.377.493
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	297.897.864.870	268.399.263.030
Lebih dari 5 tahun	162.148.907.485	147.253.413.799
Jumlah	489.217.681.495	456.294.245.855
Provisi kredit	(9.619.616.222)	(8.418.617.317)
Administrasi dan biaya transaksi	(5.391.057)	49.403.358
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	—	(445.556.847)
Jumlah kredit yang diberikan	479.592.674.216	447.479.475.049
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian kredit	(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Jumlah bersih	468.133.319.436	438.063.549.238

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Lancar	447.125.981.140	413.739.417.972
Dalam perhatian khusus	22.666.033.673	25.929.464.741
Kurang lancar	2.838.359.582	2.134.810.763
Diragukan	3.380.290.175	2.811.011.891
Macet	13.207.016.925	11.679.540.487
Jumlah	489.217.681.495	456.294.245.855
Provisi kredit	(9.619.616.222)	(8.418.617.317)
Administrasi dan biaya transaksi	(5.391.057)	49.403.358
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	—	(445.556.847)
Jumlah kredit yang diberikan	479.592.674.216	447.479.475.049
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian kredit	(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Jumlah bersih	468.133.319.436	438.063.549.238

e. Kredit bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit bermasalah dan penyisihannya menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

Sektor ekonomi :

	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdagangan	18.955.728	36.573.296	1.622.532.782	1.678.061.806
Jasa Jasa	37.499.998	22.396.661	293.951.840	353.848.499
Perindustrian	—	—	8.616.766	8.616.766
Lainnya	2.781.903.856	3.321.320.218	11.281.915.537	17.385.139.611
Jumlah	2.838.359.582	3.380.290.175	13.207.016.925	19.425.666.682
Penyisihan kerugian kredit	(140.224.540)	(890.567.489)	(7.855.796.670)	(8.886.588.699)
Jumlah bersih	2.698.135.042	2.489.722.686	5.351.220.255	10.539.077.983

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Kredit bermasalah (Lanjutan)

Sektor Ekonomi: (Lanjutan)

	2022	2022	2022	Jumlah
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Rp
Perdagangan	108.706.954	141.730.566	1.710.171.166	1.960.608.686
Jasa-jasa	—	71.806.022	427.204.569	499.010.591
Perindustrian	—	—	8.616.936	8.616.936
Lainnya	2.026.103.809	2.597.475.303	9.533.547.816	14.157.126.928
Jumlah	2.134.810.763	2.811.011.891	11.679.540.487	16.625.363.141
Penyisihan kerugian kredit	(109.099.143)	(717.794.552)	(7.773.280.204)	(8.600.173.899)
Jumlah bersih	2.025.711.620	2.093.217.339	3.906.260.283	8.025.189.242

Penggunaan :

	2023	2023	2023	Jumlah
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Rp
Modal kerja	60.929.141	58.969.957	1.453.039.000	1.572.938.098
Investasi	—	—	492.000.651	492.000.651
Konsumsi lainnya	2.777.430.441	3.321.320.218	11.261.977.274	17.360.727.933
Jumlah	2.838.359.582	3.380.290.175	13.207.016.925	19.425.666.682
Penyisihan kerugian kredit	(140.224.540)	(890.567.489)	(7.855.796.670)	(8.886.588.699)
Jumlah bersih	2.698.135.042	2.489.722.686	5.351.220.255	10.539.077.983

	2022	2022	2022	Jumlah
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Rp
Modal kerja	108.706.954	213.536.588	1.565.855.164	1.888.098.706
Investasi	—	—	636.719.493	636.719.493
Konsumsi lainnya	2.026.103.809	2.597.475.303	9.476.965.830	14.100.544.942
Jumlah	2.134.810.763	2.811.011.891	11.679.540.487	16.625.363.141
Penyisihan kerugian kredit	(109.099.143)	(717.794.552)	(7.773.280.204)	(8.600.173.899)
Jumlah bersih	2.025.711.620	2.093.217.339	3.906.260.283	8.025.189.242

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	2022
	%	%
NPL Gross	3,97	3,64
NPL Net	2,15	1,80

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

g. Penyisihan kerugian kredit yang diberikan

Penyisihan kerugian kredit yang diberikan dengan rincian berdasarkan kolektibilitas:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Lancar	2.235.629.906	413.739.418
Dalam perhatian khusus	337.136.175	402.012.491
Kurang lancar	140.224.540	109.099.143
Diragukan	890.567.489	717.794.552
Macet	7.855.796.670	7.773.280.207
Jumlah bersih	<u>11.459.354.780</u>	<u>9.415.925.811</u>

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal tahun	9.415.925.811	13.324.822.469
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	3.599.757.725	4.345.221.265
Pemulihan selama tahun berjalan	(735.101.921)	(6.269.262.458)
Penghapusan selama tahun berjalan	(821.226.835)	(1.984.855.465)
Saldo akhir tahun	<u>11.459.354.780</u>	<u>9.415.925.811</u>

Penyisihan kerugian kredit dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing akun kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPR membentuk penyisihan penghapusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Penyisihan kerugian yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	11.459.354.780	11.070.883.483
Penyisihan kerugian yang dibentuk BPR	(11.459.354.780)	(9.415.925.811)
Kelebihan (kekurangan) pembentukan penyisihan kerugian kredit	<u>—</u>	<u>1.654.957.672</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

h. Kredit yang dihapus buku

Mutasi kredit yang dihapus buku pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal tahun	12.857.375.350	11.263.891.610
Penghapusan kredit dalam tahun berjalan	821.226.835	1.984.855.465
Penerimaan kredit yang dihapus buku	(194.356.008)	(391.371.725)
Saldo akhir tahun	<u>13.484.246.177</u>	<u>12.857.375.350</u>

i. Kredit yang direstrukturisasi

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 atas kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 25.913.657.940, jenis restrukturisasi berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.285.014.130 dan Rp 2.129.709.609.
- Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebesar flat 6 – 12,75, anuitas 9 – 20,75.
- Pendapatan bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 78.003.210.016 dan Rp 74.633.659.923.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan, sebagai berikut :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	10.763.222.003	10.404.193.121
Pihak ketiga	21.526.444.007	20.808.386.242

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

7. ASET TETAP

	2 0 2 3			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	520.288.000	—	—	520.288.000
Gedung kantor	7.219.815.500	—	—	7.219.815.500
Inventaris	9.430.569.164	636.956.050	773.010.300	9.294.514.914
Jumlah	<u>17.170.672.664</u>	<u>636.956.050</u>	<u>773.010.300</u>	<u>17.034.618.414</u>
Akumulasi penyusutan :				
Gedung kantor	4.602.632.381	360.990.775	—	4.963.623.156
Inventaris	7.050.561.612	990.968.695	773.010.300	7.268.520.007
Jumlah	<u>11.653.193.993</u>	<u>1.351.959.470</u>	<u>773.010.300</u>	<u>12.232.143.163</u>
Nilai buku	<u>5.517.478.671</u>			<u>4.802.475.251</u>

	2 0 2 2			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	520.288.000	—	—	520.288.000
Gedung kantor	7.219.815.500	—	—	7.219.815.500
Inventaris	9.352.613.774	77.955.390	—	9.430.569.164
Jumlah	<u>17.092.717.274</u>	<u>77.955.390</u>	<u>—</u>	<u>17.170.672.664</u>
Akumulasi penyusutan :				
Gedung kantor	4.241.641.606	360.990.775	—	4.602.632.381
Inventaris	6.649.066.337	401.495.275	—	7.050.561.612
Jumlah	<u>10.890.707.943</u>	<u>762.486.050</u>	<u>—</u>	<u>11.653.193.993</u>
Nilai buku	<u>6.202.009.331</u>			<u>5.517.478.671</u>

Penyusutan aset tetap dibebankan pada beban penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp 1.351.959.470 untuk tahun 2023 dan Rp 762.486.050 untuk tahun 2022.

Aset tetap diasuransikan kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera (*JP Insurance*) untuk asuransi kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10.269.616.293

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

8. ASET TAK BERWUJUD

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Program aplikasi IT	230.922.500	230.922.500
Akumulasi amortisasi	(198.547.500)	(187.447.500)
Jumlah	<u>32.375.000</u>	<u>43.475.000</u>

9. ASET LAIN-LAIN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Sewa gedung kantor dibayar di muka	429.212.948	836.712.951
Premi asuransi dibayar di muka	154.075.968	161.350.700
Sewa aplikasi dibayar di muka	27.058.249	—
Lainnya	154.740.000	195.387.533
Jumlah	<u>765.087.165</u>	<u>1.193.451.184</u>

10. KEWAJIBAN SEGERA

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
PPh Pasal 25	250.000.000	298.372.448
PPh Pasal 23	101.701.877	82.076.559
Pph Pasal 21	73.783.964	247.166.101
Titipan notaris	48.950.000	14.750.000
Lainnya	427.401.393	296.130.079
Jumlah	<u>901.837.234</u>	<u>938.495.187</u>

11. UTANG BUNGA

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Bunga tabungan	193.435.406	183.477.015
Bunga deposito	431.456.574	424.184.661
Bunga pinjaman	590.591.955	590.591.955
Bunga deposito yang jatuh tempo	7.630.283	2.339.216
Jumlah	<u>1.223.114.218</u>	<u>1.200.592.847</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

12. UTANG PAJAK

a. Taksiran Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan laba rugi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	5.891.072.311	12.234.491.652
Koreksi Positif:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		
Jamuan tamu	76.608.900	—
Rekreasi atau olah raga	47.414.000	—
Sumbangan	39.707.000	—
Iuran-iuran	11.543.182	—
Lainnya	24.174.093	—
Jumlah	199.447.175	—
Laba kena pajak	6.090.519.486	12.234.491.652
Taksiran pajak penghasilan badan	1.339.914.180	2.691.588.020
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka	(1.150.473.372)	(1.979.944.479)
Pajak penghasilan kurang bayar	189.440.808	711.643.541

b. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

13. SIMPANAN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan :		
Tabungan Siwajar	12.876.397.674	11.100.195.063
Tabungan Raharja	45.883.963.773	51.246.659.014
Tabungan Sibentang	2.725.389.322	2.466.785.617
Tabungan <i>Autosettle</i>	5.772.018.744	—
Jumlah	67.257.769.513	64.813.639.694

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

13. SIMPANAN (Lanjutan)

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Deposito :		
Deposito 1 bulan	32.520.836.171	30.960.148.019
Deposito 3 bulan	32.810.734.149	21.176.077.435
Deposito 6 bulan	12.842.350.000	10.114.500.000
Deposito 12 bulan	14.614.360.393	15.712.744.000
Jumlah	<u>92.788.280.713</u>	<u>77.963.469.454</u>
Jumlah simpanan bersih	<u>160.046.050.226</u>	<u>142.777.109.148</u>

Tingkat suku bunga tabungan untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4%– 6,25% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.006.206.444 dan Rp 1.782.573.278.

Tingkat suku bunga deposito untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 5,25%–6,25% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 6.817.317.347 dan Rp 7.100.563.784.

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.351.771.831	866.757.173
Pihak ketiga	65.905.997.682	63.946.882.521
Jumlah	<u>67.257.769.513</u>	<u>64.813.639.694</u>
Deposito :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	923.680.548	523.000.000
Pihak ketiga	91.864.600.165	77.440.469.454
Jumlah	<u>92.788.280.713</u>	<u>77.963.469.454</u>
Jumlah simpanan	<u>160.046.050.226</u>	<u>142.777.109.148</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan :		
Tabungan Raharja	730.307.568	709.582.302
Deposito :		
Deposito berjangka 1 Bulan	7.750.000.000	6.700.000.000
Deposito berjangka 3 Bulan	16.150.000.000	33.425.000.000
Deposito berjangka 6 Bulan	23.000.000.000	42.800.000.000
Jumlah	46.900.000.000	82.925.000.000
Jumlah simpanan dari bank lain	47.630.307.568	83.634.582.302

Berikut simpanan dari bank lain berdasarkan nama bank sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Tabungan :		
PT BPR Berkah (Perseroda)	569.272.053	335.900.088
PT BPR Amal Bhakti Sejahtera	1.142.073	1.106.153
PT BPR Serang (Perseroda)	98.938.808	19.074.036
PT BPR Central Artha Rezeki	60.954.634	353.502.025
Jumlah tabungan	730.307.568	709.582.302
Deposito :		
Perumda BPR Bank Jogja	5.000.000.000	13.000.000.000
Perumda BPR Kota Bogor	2.000.000.000	—
PT BPR Asri Cikupa Karya	2.000.000.000	—
PT BPR Bringin Dana Sejahtera	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Cahaya Artha Sejati	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Central Sejahtera	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Gamon	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Gita Makmur Utama	2.000.000.000	—
PT BPR Indra Candra	2.000.000.000	17.000.000.000
PT BPR Karya Artha Sejahtera	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kredit Mandiri	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Mandiri Artha Abadi	2.000.000.000	—
PT BPR Sleman (Perseroda)	2.000.000.000	—
PT BPR Supra Artapersada	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Utomo Manunggal	2.000.000.000	—
Jumlah dilanjutkan	33.000.000.000	44.000.000.000

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

	2023 Rp	2022 Rp
Jumlah lanjutan	33.000.000.000	44.000.000.000
PT BPR Ragam Peran Mandiri	1.400.000.000	1.400.000.000
PT BPR Athena Surya Prima	1.250.000.000	1.000.000.000
PT BPR Artadamas Mandiri	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bahtera Masyarakat	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Daya Lumbung Asia	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Delta Artha Perseroda	1.000.000.000	—
PT BPR DP Taspen	1.000.000.000	—
PT BPR Hidup Artha Putra	1.000.000.000	1.300.000.000
PT BPR Hidup Arthagraha	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)	1.000.000.000	—
PT BPR Amal Bhakti Sejahtera	750.000.000	1.000.000.000
PT BPR Baturaja	500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bumidhana	500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Harapan Saudara	500.000.000	—
PT BPR Muara Sumber Dana	500.000.000	500.000.000
PT BPR Pantura Abadi	500.000.000	—
PT BPR Lestari Bali	—	7.000.000.000
PT BPR Berkah (Perseroda)	—	3.000.000.000
PT BPR Serang (Perseroda)	—	3.000.000.000
Perumda BPR Kota Bandung	—	2.000.000.000
PT BPR Dana Nagoya	—	2.000.000.000
PT BPR Lestari Banten	—	2.000.000.000
PT BPR Lestari Jatim	—	2.000.000.000
PT BPR Labuhan Dana Sentosa	—	1.925.000.000
PT BPR Universal Kalbar	—	1.800.000.000
PT BPR Central Artha Rezeki	—	500.000.000
Jumlah	<u>46.900.000.000</u>	<u>82.925.000.000</u>
Jumlah simpanan dari bank lain	<u>47.630.307.568</u>	<u>83.634.582.302</u>

Tingkat suku bunga tabungan dari bank lain untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4% per tahun.

Tingkat suku bunga deposito dari bank lain berkisar antara 6,75% - 7% (2023) dan 6% - 8% (2022) per tahun.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	66.136.769.017	35.200.000.255
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	57.291.666.674	38.250.000.001
PT Bank Danamon, Tbk	24.572.876.677	29.688.600.210
PT Bank Permata, Tbk	24.375.000.017	36.875.000.009
PT BPD DKI	21.030.000.597	9.840.000.000
PT BPR Lestari Banten	17.182.322.514	19.330.258.066
PT BPD Banten, Tbk	17.100.000.086	12.833.333.396
PT Sarana Multigriya Finansial	16.116.909.984	6.459.255.736
PT BPR Daya Lumbung Asia	14.771.589.945	18.142.190.399
PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk	7.618.604.051	15.551.062.665
PT BPD Jatim	6.375.000.000	7.125.000.000
PT Bank Oke Indonesia	2.500.000.000	12.666.666.691
Jumlah pokok pinjaman	<u>275.070.739.562</u>	<u>241.961.367.428</u>
Dikurangi:		
Provisi	(1.570.411.906)	(1.748.043.464)
Jumlah pinjaman yang diterima	<u>273.500.327.656</u>	<u>240.213.323.964</u>

a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Berdasarkan Nomor 325/LGL-MSME-JKT/LINKAGE/PK/IV/2019 tanggal 25 April 2019, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Transaksi Khusus (PTK)-9, jumlah plafond sebesar Rp 100.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% p.a, jangka waktu 72 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu: Fidusia atas tagihan BPR kepada debitur dengan cakupan 100%, termasuk hasil penjualan agunan yang diberikan debitur kepada BPR dan Dana Tunai sebesar 1 (satu) kali angsuran per penarikan.

Berdasarkan Nomor 027/LGL-NAT/PK/JKT/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Transaksi Khusus (PTK)-10, jumlah plafond sebesar Rp 100.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8% p.a, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak fasilitas ditandatangani. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang Dagang dan *Cash Collateral*.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 66.136.769.017 dan Rp 35.200.000.255.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk

Berdasarkan Nomor 010/DKM-KM2/SPPK/2022 tanggal 5 September 2022, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja, jumlah plafond sebesar Rp 70.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% p.a *efektif subject to change* dan setiap atas perubahannya akan diberitahukan BJB kepada PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal per penarikan faslitas kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu: Cash Collateral sebesar 1 kali jumlah angsuran dari kewajiban tertinggi angsuran pokok dan bunga dan 'Hak tagih (piutang lancar) atas eksisting debitur BPR senilai minimal 100 dari outstanding fasilitas kredit.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 57.291.666.674 dan Rp 38.250.000.001.

c. PT Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan Nomor B.CL/238/XI/HK/2022 tanggal 16 November 2022, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Angsuran Berjangka (KAB)–BARU, jumlah plafond sebesar Rp 30.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8% tingkat suku bunga akan di *review* oleh bank setiap dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar, jangka waktu 60 bulan sejak perjanjian kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu: Daftar piutang (AR) milik dan atas nama PT BPR Kertaraharja Gemilang diikat Fidusia minimal sebesar Rp 37.500.000.000 dan Margin Deposito senilai Rp 1.500.000.000.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 24.572.876.676 dan Rp 29.688.600.210.

d. PT Bank Permata, Tbk

Berdasarkan Nomor 093/BP/LOO/CRC-JKT/WB/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, BPR memperoleh fasilitas pinjaman TL (*New*)–*Non Revolving*–BARU, jumlah plafond sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,75% *fixed*, jangka waktu 60 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit (termasuk *Availability Period/AP*). Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu *Cash Collateral* sebesar 10 dari limit (per pencairan) sudah diikat sempurna.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 24.375.000.017 dan Rp 36.875.000.009.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

e. PT BPD DKI

Berdasarkan Nomor 359/SPPK/KRI/XI/2022 tanggal 30 November 2022, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Modal Kerja *Linkage-Excuting*, jumlah plafond sebesar Rp 25.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,75% p.a, jangka waktu 72 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, termasuk *avallability period*. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang kepada debitur atau End User nya yang dijaminan kepada PT BPD DKI.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 21.030.000.597 dan Rp 9.840.000.000.

f. PT BPR Lestari Banten

Berdasarkan Nomor 101/Lestari Banten-OL/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, jumlah plafond sebesar Rp 20.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% p.a anuitas, jangka waktu 84 bulan. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Nilai Fidusia AR yang akan dipasang adalah 125 dari total Plafond pinjaman dengan nilai fidusia AR Rp 25.000.000.000 dan *Cash Collateral* 5 total Plafond Pinjaman.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 17.182.322.515 dan Rp 19.330.258.066.

g. PT BPD Banten, Tbk

Berdasarkan Nomor 367/UMKM&PPK/SPPK/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja BPR, jumlah plafond sebesar Rp 25.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10,5% p.a efektif *floating rate-Reviewable* sesuai kebijakan yang berlaku di bank Banten, terhadap perubahan suku bunga dimaksud akan diberitahukan secara tertulis dengan jangka waktu pinjaman 66 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100 dari Outstanding dan *Cash Colateral* Minimal sebesar Rp 640.000.000.

Berdasarkan Nomor 476/UMKM/SPPK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, BPR memperoleh fasilitas pinjaman pinjaman Kredit Modal Kerja BPR, jumlah plafond sebesar Rp 9.583.333.355 dengan suku bunga sebesar 10% p.a efektif *floating rate-Reviewable* sesuai kebijakan yang berlaku di bank Banten, terhadap perubahan suku bunga dimaksud akan diberitahukan secara tertulis, jangka waktu 66 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100 dari Outstanding, dan *Cash Colateral* Minimal sebesar Rp 640.000.000.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

g. PT BPD Banten, Tbk (Lanjutan)

Berdasarkan Nomor B.008/OL/KRD/03/IX/2021 tanggal 13 September 2021, BPR memperoleh fasilitas pinjaman pinjaman Kredit Angsuran Berjangka BPR Jawara jumlah plafond sebesar Rp 10.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10,5% p.a efektif *floating rate-Reviewable* sesuai kebijakan yang berlaku di bank Banten, terhadap perubahan suku bunga dimaksud akan diberitahukan secara tertulis, jangka waktu 66 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100% dari Outstanding dan *Cash Colateral* Minimal sebesar Rp 255.000.000.

Berdasarkan Nomor R.013/OKJ-BB/SPPK/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja jumlah plafond sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9.25% efektif p.a dan dapat berubah sewaktu-waktu atas kelonggaran Tarik berdasarkan pertimbangan Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100% dari Outstanding dan *Cash Colateral* Minimal sebesar Rp 2.000.000.000. Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 17.100.000.086 dan Rp 12.833.333.396.

h. PT Sarana Multigriya Finansial

Berdasarkan Akta Perjanjian *Uncommotted Fafacility Line* Nomor 08 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 09, tanggal 18 Mei 2022 dan dibuat dihadapan Vita Cahyojati SH, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan tujuan pinjaman menggantikan sumber pendanna (*Refinancing*) atas pembiayaan perumahan yang telah disalurkan oleh BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial, jumlah plafond sebesar Rp 2.978.542.000 dengan suku bunga sebesar 4,75% *fixed* dan *effective*, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas.

Berdasarkan Akta Perjanjian *Uncommotted Fafacility Line* Nomor 08 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 09, tanggal 18 Mei 2022 dan dibuat dihadapan Vita Cahyojati SH, Notaris di Jakarta Selata (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan tujuan pinjaman untuk menggantikan sumber dana Lembaga Keuangan yang telah disalurkan untuk pembiayaan Perumahan, jumlah plafond sebesar Rp 3.134.000.000 dengan suku bunga sebesar 7,75% *fixed* dan efektif, jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas.

Berdasarkan Akta Perjanjian *Uncommotted Fafacility Line* Nomor 08 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 09, tanggal 18 Mei 2022 dan dibuat dihadapan Vita Cahyojati SH, Notaris di Jakarta Selata (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan tujuan pinjaman untuk menggantikan sumber pendanna (*Refinancing*) atas pembiayaan perumahan yang telah disalurkan oleh BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial, jumlah plafond sebesar Rp 3.643.834.648 dengan suku bunga sebesar 4, 6% p.a *fixed* dan efektif, jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

h. PT Sarana Multigriya Finansial (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian *Uncommotted Fafacility Line* Nomor 39 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 40, tanggal 17 April 2023 dan dibuat dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Hum (Selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan tujuan pinjaman untuk menggantikan sumber dana Lembaga Keuangan yang telah disalurkan untuk pembiayaan Perumahan, jumlah plafond sebesar Rp 7.935.000.000 dengan suku bunga sebesar 7,55% p.a *fixed* dan efektif 3 (Tiga) Tahun, jangka waktu 3 tahun.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 16.116.909.984 dan Rp 6.459.255.736.

i. PT BPR Daya Lumbung Asia

Berdasarkan Nomor 0071/BPR-DLA/KREDIT/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 BPR memperoleh fasilitas pinjaman Angsuran Berjangka, jumlah plafond sebesar Rp 15.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9% efektif, jangka waktu 60 bulan. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100 dari Outstanding dan *Sinking Fund* minimal satu kali angsuran.

Berdasarkan Nomor 0130/BPR-DLA/KREDIT/IX/2022 tanggal 27 September BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit *Linkage*, jumlah plafond sebesar Rp 4.700.000.000 dengan suku bunga sebesar 9% efektif, jangka waktu 60 bulan. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100 dari Outstanding dan *Sinking Fund* minimal satu kali angsuran.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 14.771.589.945 dan Rp 18.142.190.399.

j. PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk

Berdasarkan Nomor 238/SPK/BJI-JAK/B-Link/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, BPR memperoleh pinjaman Fasilitas Langsung, jumlah plafond sebesar Rp 30.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% p.a, jangka waktu 54 bulan sejak tanggal efektif fasilitas kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu Piutang min 100 dari Outstanding dan *Sinking Fund* minimal satu kali angsuran.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 7.618.604.051 dan Rp 15.551.062.665.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

k. PT BPD Jatim

Berdasarkan Nomor 061/227/JKT/KRD/SPPK tanggal 15 Juni 2022, BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit *Linkage* BPR Pola Eksekuting, jumlah plafond sebesar Rp 7.5000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,75% p.a, jangka waktu 120 bulan dengan batas waktu penarikan fasilitas kredit maksimal 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu *Outstanding* nominatif debitur (*Asset Replacement*) minimal sebesar 125 dari plafond kredit atau sebesar Rp 9.375.000.000.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 6.375.000.000 dan Rp 7.125.000.000.

l. PT Bank Oke Indonesia

Berdasarkan Nomor SPPK 088/BOI/BD/IV/2019 tanggal 22 April BPR memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja, jumlah plafond sebesar Rp 30.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 10,50% p.a efektif, jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas kredit. Jaminan atas pinjaman tersebut yaitu: Gadai deposito pada PT Bank Oke Indonesia atas nama Debitur sebesar 5 dari plafond pinjaman dan Fidusia atas piutang milik BPR sebesar 100% dari plafond fasilitas KMK.

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.500.000.000 dan Rp 12.666.666.691.

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja No 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk mengakui Kewajiban Imbalan Pasca Kerja untuk karyawan tetapnya. Besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Jumlah karyawan tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 134 dan 138 orang.

Kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo awal	343.065.394	343.065.394
Penambahan	—	—
Pengurangan	(141.928.581)	—
Jumlah	201.136.813	343.065.394

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2023, BPR melakukan penghitungan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto & Rekan (KKA HBR), dalam laporannya Nomor HBR240267/TM-HB/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan asumsi sebagai berikut:

	2 0 2 3	2 0 2 2
Usia pensiun	: 56 tahun	56 tahun
Tingkat bunga diskonto	: 6,98% per tahun	7,56% per tahun
Tingkat kenaikan gaji tahunan	: 5% per tahun	5% per tahun
Metode penilaian aktuarial	: <i>Projected Unit credit</i>	<i>Projected Unit credit</i>

Mutasi kewajiban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Saldo awal	571.618.635	28.886.461
(Beban) Pendapatan	(1.141.666.297)	472.383.095
Pembayaran Manfaat Realisasi	141.928.581	70.349.079
Jumlah	(428.119.081)	571.618.635

Berdasarkan data tersebut diatas, maka terdapat perbedaan antara kewajiban imbalan kerja di Neraca dengan hasil penghitungan oleh Aktuaris Independen sebesar Rp 629.255.894, terhadap perbedaan tersebut BPR tidak melakukan.

17. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Dana CSR	349.838.194	243.067.085
Dana tenaga kerja	—	3.236.617
Jumlah	349.838.194	246.303.702

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

18. MODAL DISETOR

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Modal dasar	250.000.000.000	250.000.000.000
Masih harus disetor	(178.350.000.000)	(178.350.000.000)
Jumlah Modal Disetor	71.650.000.000	71.650.000.000

Modal dasar PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang tanggal 1 Oktober 2019. Selain itu berdasarkan akta notaris Harsono, S.H Nomor 23 tanggal 23 Desember 2020, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0069155.AH.01.01 TAHUN 2020 tertanggal 23 Desember 2020, Pasal 4 menyatakan bahwa modal dasar BPR sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor 28,66 atau sejumlah 71.650.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp71.650.000.000.

Berdasarkan akta notaris Harsono, S.H Nomor 23 tanggal 23 Desember 2020, sejumlah modal ditempatkan dan/atau disetor tersebut dimiliki oleh 4 (empat) pemegang saham yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komposisi kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Jumlah Rp	Persentasi kepemilikan %
Pemerintah Kabupaten Tangerang	55.000.000	55.000.000.000	76,76
Pemerintah Provinsi Banten	15.000.000	15.000.000.000	20,94
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	1.050.000	1.050.000.000	1,47
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	600.000	600.000.000	0,83
Jumlah	71.650.000	71.650.000.000	100

19. CADANGAN

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Cadangan Umum	17.165.191.288	16.210.900.925
Cadangan Tujuan	11.371.315.625	10.417.025.262
Jumlah	28.536.506.913	26.627.926.187

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

20. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2022 serta Persetujuan Pembagian Laba dan Dividen atas Hasil Usaha Tahun 2022 PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tanggal 15 Maret 2023, menyetujui, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 sebesar Rp 9.542.903.632. Penggunaan laba bersih tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah Pasal 82 Ayat 3 sebagai berikut:

No.	Penggunaan Laba Bersih	Distribusi	
		Proporsi %	Jumlah Rp
1	Dividen	55	5.248.596.998
2	Cadangan Umum	10	954.290.363
3	Cadangan Tujuan	10	954.290.363
4	Dana Kesejahteraan	10	954.290.363
5	Jasa Produksi	8	763.432.291
6	Tantiem	4	381.716.145
7	Corporate Social Responsibility (CSR)	3	286.287.109
	Jumlah	100	9.542.903.632

21. PENDAPATAN BUNGA

	2023 Rp	2022 Rp
Bunga penempatan pada bank lain:		
Pendapatan bunga giro	660.684.445	838.155.871
Pendapatan bunga tabungan	288.785.034	166.807.401
Pendapatan bunga deposito	2.178.744.854	1.557.715.915
Jumlah	3.128.214.333	2.562.679.187
Bunga kontraktual:		
Kredit yang diberikan	78.003.210.016	74.633.659.923
Jumlah bunga	81.131.424.349	77.196.339.110
Provisi dan administrasi kredit	5.924.573.552	4.882.689.775
Jumlah pendapatan bunga	87.055.997.901	82.079.028.885

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

22. BEBAN BUNGA

	2023 Rp	2022 Rp
Bunga simpanan dari bank lain :		
Bunga dan provisi pinjaman diterima	24.797.259.702	19.649.061.818
Bunga deposito dari bank lain	4.386.627.395	5.598.007.357
Bunga tabungan dari bank lain	28.826.938	28.957.727
	<u>29.212.714.035</u>	<u>25.276.026.902</u>
Bunga dari simpanan kepada pihak ketiga bukan bank:		
Bunga deposito	5.400.544.076	4.671.142.697
Bunga tabungan	2.058.115.415	1.824.897.316
	<u>7.458.659.491</u>	<u>6.496.040.013</u>
Premi Penjaminan Simpanan / LPS	<u>425.955.061</u>	<u>446.679.516</u>
Jumlah Beban Bunga	<u>37.097.328.587</u>	<u>32.218.746.431</u>

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2023 Rp	2022 Rp
Pemulihan PPAP	1.096.979.418	8.175.468.266
Denda atau <i>penalty</i>	851.540.815	113.002.776
Penerimaan dari kredit hapus buku	194.356.008	391.371.725
Administrasi tabungan	147.407.500	162.218.500
Penutupan rekening	64.168.144	65.192.666
Administrasi penarikan deposito	46.313.800	38.044.988
Administrasi pinjaman	4.044.619	28.719.520
Lainnya	467.873.606	43.132.243
Jumlah	<u>2.872.683.910</u>	<u>9.017.150.685</u>

24. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF

	2023 Rp	2022 Rp
Kredit yang diberikan	3.599.757.725	6.129.934.728
Penempatan pada bank lain	526.773.803	132.332.220
Jumlah	<u>4.126.531.528</u>	<u>6.262.266.948</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

25. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	2023 Rp	2022 Rp
Penyusutan aset tetap:		
Gedung kantor	360.990.775	360.990.775
Inventaris	990.968.695	932.595.275
Amortisasi aset tak berwujud:		
Program aplikasi IT	11.100.000	1.425.000
Jumlah	<u>1.363.059.470</u>	<u>1.295.011.050</u>

26. BEBAN PEMASARAN

	2023 Rp	2022 Rp
Promosi produk	617.335.034	673.138.556
<i>Sponsorship</i>	186.750.400	82.073.000
Iklan	6.500.000	7.500.000
Hadiah nasabah	2.200.000	6.500.000
Jumlah	<u>812.785.434</u>	<u>769.211.556</u>

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2023 Rp	2022 Rp
Tenaga Kerja:		
Gaji direksi dan karyawan	8.337.223.871	8.009.527.804
Tunjangan perbaikan penghasilan	6.330.604.705	6.254.759.768
Tunjangan makan dan <i>transport</i>	2.939.683.833	2.883.176.000
Tunjangan jabatan	1.865.549.696	1.775.045.696
Tunjangan hari raya	1.686.734.506	1.584.728.279
Tunjangan cuti	1.487.150.993	1.607.163.973
Tunjangan pph pasal 21	1.204.242.247	1.405.430.222
Tunjangan pangan	840.241.483	791.121.739
Tunjangan anak dan istri atau suami	816.393.421	761.236.420
Honor dewan komisaris	736.055.172	629.106.987
Uang lembur	231.557.653	211.928.378
Tunjangan kerja komite	20.000.000	20.000.000
Jasa pengabdian pengurus	—	215.295.301
Imbal pasca kerja atau dana pensiun	—	70.349.079
Lainnya	86.768.874	1.815.509.429
Jumlah beban tenaga kerja	<u>26.582.206.454</u>	<u>28.034.379.075</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

	2023 Rp	2022 Rp
Premi Asuransi:		
Premi asuransi pensiun	2.341.200.899	—
Premi asuransi jamsostek	1.110.772.299	1.041.981.727
Premi asuransi kesehatan	602.203.326	555.440.711
<i>Cash in safe dan cash in transit</i>	236.031.955	201.253.911
Premi asuransi kendaraan	64.738.097	77.861.171
Premi asuransi kebongkaran	42.188.427	32.735.430
Premi asuransi kecelakaan pegawai	25.650.000	23.437.500
Premi asuransi gedung kantor dan inventaris	15.195.113	14.421.531
<i>Cash in cashier box</i>	14.880.004	14.315.002
Premi asuransi gempa bumi	12.631.041	11.888.362
Jumlah beban premi asuransi	<u>4.465.491.161</u>	<u>1.973.335.345</u>
Pendidikan dan pelatihan:		
Diklat intern	366.814.500	147.436.939
Diklat lembaga lain	136.986.302	154.527.396
Perjalanan dinas untuk pendidikan	130.538.000	200.875.000
Jumlah beban Pendidikan dan Pelatihan	<u>634.338.802</u>	<u>502.839.335</u>
Barang dan Jasa:		
BBM/Parkir/Tol	744.988.652	607.390.323
Seragam karyawan	508.629.000	475.505.000
Listrik	343.166.144	290.495.130
Keperluan kantor	301.486.885	332.446.781
Honorarium atau jasa notaris	255.100.000	342.375.000
Pemakaian barang cetakan	239.504.424	264.788.120
Telepon/telex/fax	205.079.719	159.835.673
Perjalanan dinas	145.638.997	107.484.756
Alat tulis kantor	98.611.250	103.190.000
Relokasi kantor	63.718.020	—
Air dan gas	32.811.135	50.607.732
Materai atau perangko	31.585.000	45.673.000
Langganan majalah atau koran	16.121.900	10.440.000
Kirim surat atau barang atau dokumen	10.022.300	7.408.600
Administrasi bank	8.293.400	8.788.100
<i>Photo copy</i>	5.924.100	10.986.000
Pengembangan IT	397.800	—
Pengurusan pihak ketiga	—	264.901.399
Lainnya	31.215.601	37.210.280
Jumlah beban barang dan jasa	<u>3.042.294.327</u>	<u>3.119.525.894</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

	2023 Rp	2022 Rp
Sewa:		
Sewa kendaraan	669.407.500	371.700.000
Sewa kantor	627.500.003	616.879.617
Sewa mesin dan elektronik	9.937.596	11.801.646
Lainnya	1.088.554.077	664.204.170
Jumlah beban sewa	<u>2.395.399.176</u>	<u>1.664.585.433</u>
Pemeliharaan dan perbaikan:		
Kendaraan bermotor	196.215.447	178.145.837
Inventaris kantor	89.326.668	55.909.000
Gedung kantor	77.393.000	77.238.000
Lainnya	4.450.001	2.882.000
Jumlah beban pemeliharaan dan perbaikan	<u>367.385.116</u>	<u>314.174.837</u>
Pajak:		
Kendaraan bermotor	52.188.200	58.012.300
Pajak bumi dan bangunan	1.700.000	1.668.725
Jumlah beban pajak	<u>53.888.200</u>	<u>59.681.025</u>
Operasional lainnya:		
Insentif bendaharawan	2.218.833.904	2.247.425.017
Rapat pertemuan	144.213.801	164.957.243
Representatif	86.500.000	50.560.000
Jamuan makan atau perjalanan tamu	76.608.900	81.993.210
Operasional direksi	63.202.864	45.733.711
Keamanan	50.050.000	50.150.000
Rekreasi atau olahraga	47.414.000	17.854.822
Voucher handphone kantor	22.495.308	199.500
Penerimaan calon pegawai	—	63.102.700
Lainnya	305.177.181	—
Jumlah beban operasional lainnya	<u>3.014.495.958</u>	<u>2.721.976.203</u>
Jumlah beban dan administrasi	<u>40.555.499.194</u>	<u>38.390.497.147</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

28. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan non operasional:		
Fee based asuransi	311.697.485	216.707.405
Fee administrasi taspen	60.068.689	—
Selisih kas lebih	44.540	45.229
Lainnya	37.251.528	30.094.298
Keuntungan penjualan aset tetap	—	275.000.000
Jumlah pendapatan non operasional	<u>409.062.242</u>	<u>521.846.932</u>
Beban non operasional :		
Iuran-iuran	314.786.436	276.884.224
Sumbangan	145.707.000	139.945.696
Denda sanksi administrasi	6.800.000	5.590.000
Lainnya	24.174.093	25.381.799
Jumlah beban non operasional	<u>491.467.529</u>	<u>447.801.719</u>

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, transaksi tersebut meliputi :

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Sifat dari transaksi
Yusuf Hermawan	Komisaris Utama	Deposito
Beni Subarsyah	Komisaris Independen	Kredit, Deposito
Bangbang Purnawan	Komisaris Independen	Kredit, Tabungan, Deposito
Ai Suherlan	Direktur Utama	Kredit, Tabungan, Deposito
Indra Hartati	Istri Direktur Utama	Tabungan, Deposito
Muhammad Rafdan Nur Faiz	Putra Direktur Utama	Deposito
Uus Mustaudie	Direktur Operasional	Tabungan, Deposito
Cucu Suhaenah	Istri Direktur Operasional	Tabungan, Deposito
Fauzan Isnia Puspita	Putri Direktur Operasional	Deposito
Eka Renaldi	Putra Direktur Operasional	Tabungan, Deposito
Deni Setia Wahyudi	Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan	Kredit, Tabungan, Deposito
Abdul Ghani	Kepala KC KPO	Kredit, Tabungan
Ashadi Ruswandi	Kepala KC Serang	Kredit, Tabungan
Rochaidin	Kepala KC Kelapa Dua	Kredit, Tabungan, Deposito
Taufik Firdaus	Kepala KC Balaraja	Tabungan
Eka Ratna Juwita	Kepala KC Tigaraksa	Tabungan
Dewi Sulastri	Kepala KC Pasar Kemis	Tabungan, Deposito
Denny Kristiyanto D N	Kabag. SDM dan Umum KPNO	Kredit, Tabungan
Ahmad Firdaus	Kabag. Operasional	Kredit, Deposito
Irfan Hilmi Handriana	Kasatker. Manrisk, Kepatuhan & APU-PPT	Kredit, Tabungan
Fristy Lestari	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	Tabungan, Deposito
Natalia Tri Rahayu	Kabag. Akuntansi dan Pelaporan	Kredit, Tabungan
Alif	Kepala Satuan Kerja TI	Kredit, Tabungan

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.285.014.130 dan Rp 2.129.709.609. (lihat Catatan 6).
- b. Penempatan dana dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan sebagai berikut:
 1. Tabungan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.351.771.831 dan Rp 866.757.173.
 2. Deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 923.680.548 dan Rp 523.000.000 (lihat Catatan 12).

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 adalah sebesar 6,25.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 425.955.061 dan Rp 446.679.516 (lihat Catatan 23).

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

31. RASIO KECUKUPAN MODAL

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

	2023 Rp	2022 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)		
1. ASET NERACA		
1.1. Kas	—	—
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	—	—
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	—	—
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	—	—
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	—	—
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	21.643.312.991	25.113.733.785
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	221.142.372	421.035.652
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	—	—
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	4.570.265.630	2.496.798.416
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20 (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	—	—
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	86.474.825.609	47.725.860.804
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	—	—
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	710.030.370	928.975.913
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuandengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	2.807.012.170	3.341.094.349
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	273.018.961.686	327.011.816.950
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	5.471.480.105	4.019.396.618
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	17.265.540.914	17.401.595.164
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	—	—
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	4.207.584.392	4.019.552.284
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum	<u>416.390.156.239</u>	<u>432.479.859.936</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

31. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2023 Rp	2022 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	71.650.000.000	71.650.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.1. Agio	—	—
1.1.2.2. Dana setoran modal	—	—
1.1.2.3. Modal sumbangan	—	—
1.1.2.4. Cadangan umum	17.165.191.289	16.210.900.925
1.1.2.5. Cadangan tujuan	11.371.315.625	10.417.025.262
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	—	—
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran Utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP	2.275.579.065	4.771.451.816
1.1.2.8. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	—	—
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	—	—
1.1.2.10. AYDA berupa tanah dan/ bangunan		
1.1.2.10.1. melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	—	—
1.1.2.10.2. melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	—	—
1.1.2.10.3. melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	—	—
Jumlah modal inti utama	<u>102.462.085.979</u>	<u>103.049.378.003</u>
1.2 Modal Inti Tambahan	—	—
1.3 Jumlah Modal Inti	<u>102.462.085.979</u>	<u>103.049.378.003</u>
II. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	—	—
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	—	—
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	5.170.134.056	992.553.211
Jumlah modal pelengkap	<u>5.170.134.056</u>	<u>992.553.211</u>
III. Jumlah modal	<u>107.632.220.035</u>	<u>104.041.931.213</u>
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP UMUM	416.390.156.239	432.479.859.936
Jumlah kelebihan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR	69.150.873.479	68.450.989.208
Jumlah kelebihan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR	57.665.401.286	52.144.348.021

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

32. INFORMASI LAINNYA

	2 0 2 3 %	2 0 2 2 %
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	25,85	35,44
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	2,87	2,55
Pemenuhan PPAP	100,00	85,05
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	1,00	2,22
<i>Return On Equity (ROE)</i>	4,44	8,85
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	8,35	8,63
Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	93,36	86,65
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Rasio (LDR)</i>	86,47	86,12
<i>Cash Rasio</i>	25,07	63,29

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 3 Rp	2 0 2 2 Rp
Komitmen:		
Aset/Tagihan Komitemen:		
Fasilitas pinjaman yang diterima belum ditarik	77.308.623.352	58.557.476.483
Kewajiban Komitemen:		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	—	6.740.127.699
Jumlah	<u>77.308.623.352</u>	<u>65.297.604.182</u>
Kontijensi:		
Aset/Tagihan Kontijensi:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.568.544.315	4.504.937.962
Aset produktif yang di hapus buku	17.433.245.597	12.857.375.350
Jumlah	<u>23.001.789.912</u>	<u>17.362.313.312</u>

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

34. MANAJEMEN RISIKO

BPR menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Risiko-risiko yang dikelola oleh BPR berdasarkan POJK tersebut terdiri dari:

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Operasional
- c. Risiko Kepatuhan
- d. Risiko Likuiditas
- e. Risiko Reputasi, dan
- f. Risiko Strategik

BPR memiliki modal inti lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015, BPR diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko atas seluruh Risiko tersebut diatas. BPR telah berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Pengelolaan Risiko yang telah diupayakan oleh BPR adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan berbasis prinsip “empat mata” (*“four eyes principle”*) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.

BPR telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan (KDP) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan BPR, PBI, POJK serta sesuai dengan Praktik Bank Perkreditan Rakyat Nasional. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan database perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.

Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

BPR telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis stress testing (kondisi terburuk) terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil stress testing tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BPR melakukan analisis stress testing ini secara berkala. Stress testing bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “stressful condition” sehingga BPR dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “contingency plan”.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Operasional

Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan BPR untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam manajemen risiko suatu Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Divisi atau Unit Kerja yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko. BPR juga telah memiliki database kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja. Tujuan utama diimplementasikannya database ini adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan dipergunakan BPR dalam memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BPR.

Selain itu database ini juga digunakan BPR untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/ memitigasi risiko kerugian operasional, yang mungkin timbul di kemudian hari. BPR telah mengimplementasikan *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu pedoman yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (*early warning sign*) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja.

Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, BPR telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BPR. Satuan Kerja juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan triwulan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. BPR juga telah memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, BPR memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

34. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Likuiditas

Dalam melakukan manajemen Risiko Likuiditas, Bank memastikan kecukupan dana dan menetapkan limit-limit sesuai ketentuan Regulator maupun ketentuan internal Bank. Bank memiliki batasan cadangan likuiditas dalam bentuk limit safety level, yaitu proyeksi cadangan likuiditas Bank untuk tiga bulan kedepan yang dipantau secara berkala.

Risiko Reputasi

Setiap unit kerja di Bank wajib menjaga reputasi Bank sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan Risiko Reputasi memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya, sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Bank telah memiliki standar layanan nasabah yang dimonitor secara berkala, dan contact center untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan keluhan maupun *inquiry* mengenai produk dan layanan Bank.

Risiko Strategik

Dalam pengelolaan Risiko Strategik, Bank secara rutin melakukan review kinerja dan mengevaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, apabila diperlukan.

35. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 18 September 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen.
- e. Sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan.

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2023**

35. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 19 Februari 2024.

Bagian Ketiga

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA



Mobil Kas Keliling

Meningkatkan & memperluas jangkauan layanan,
Memberikan kemudahan bagi nasabah
& masyarakat lainnya

www.bprkrngemilang.co.id[bprkrngemilang](https://www.facebook.com/bprkrngemilang)[bprkrngemilang](https://www.instagram.com/bprkrngemilang)[bprkrngemilang](https://www.youtube.com/bprkrngemilang)

BANK SAHABAT ANAK NEGERI

www.bprkrngemilang.co.id[bprkrngemilang](https://www.facebook.com/bprkrngemilang)[bprkrngemilang](https://www.instagram.com/bprkrngemilang)[bprkrngemilang](https://www.youtube.com/bprkrngemilang)

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, BPR wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lain yang meliputi :

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1.1. Standar akuntansi

Laporan Keuangan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) Tahun Buku 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR);

1.2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

1. Kebijakan konsep dasar pengukuran

- a. *Biaya historis*, dimana aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. *Biaya kini*, dimana aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar, bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Utang dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
- c. *Nilai realisasi*, dimana aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Utang dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
- d. *Nilai sekarang (present value)*; dimana nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukan perhitungan/saat ini sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- e. *Nilai wajar*, dimana jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
- f. *Dasar akrual*, dimana laporan keuangan, kecuali laporan arus kas disusun dengan menggunakan dasar akrual. Pos-pos diakui sebagai aset,

kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban, ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

2. Penyusunan laporan keuangan

Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas yang didefinisikan sebagai berikut :

- a. *Aset* adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh BPR;
- b. *Kewajiban* adalah merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR yang mengandung manfaat ekonomi;
- c. *Ekuitas* adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.

3. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari BPR sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. *Pendapatan (income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal;
- b. *Beban (expenses)* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal;
- c. *Pengakuan pendapatan dan beban* dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- a. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
- b. Aktivitas investasi (investing) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

- c. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR.
- d. Kas terdiri atas:
 1. Kas dan kas dalam valuta asing;
 2. Giro pada bank lain;
 3. Tabungan pada bank atau BPR lain.
- e. Setara kas, antara lain:
 1. SBI dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. Deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- f. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

5. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan.

Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi :

- a. Modal saham, misalnya penambahan modal saham;
- b. Laba/rugi yang belum direalisasi dalam Sertifikat Bank Indonesia;
- c. Surplus revaluasi aset tetap;
- d. Dana setoran modal - ekuitas;
- e. Saldo laba (laba ditahan).

1.3. Kebijakan akuntansi BPR

1. Pengakuan dalam laporan keuangan

- a. **Aset**, diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi;
- b. **Kewajiban**, diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber

daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal;

- c. **Pendapatan**, pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal;
- d. **Beban**, pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengakuan dan pengukuran beban dilakukan sebagai berikut :
 1. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.
 2. Premi dibayar dimuka dalam rangka program penjaminan diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut;
 3. Beban administrasi umum diakui:
 - a. seluruhnya pada periode terjadinya; atau
 - b. sebesar alokasi proporsional selama beberapa periode untuk beban administrasi umum yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan.
- e. **Laba rugi**, Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2. Kredit yang diberikan

- a. Pengakuan dan pengukuran terhadap nilai buku awal pada saat penyaluran kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR;
- b. Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi;
- c. Penghentian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dilunasi atau agunan diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit;
- d. Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi

belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima;

- e. Bunga kredit non-performing diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

3. Penyisihan kerugian kredit

- a. Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit;
- b. Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan;
- c. Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan, antara lain:
 - 1. Kualitas kredit
 - 2. Nilai agunan yang tersedia, yang diperhitungkan, antara lain, berdasarkan jenis agunan, jenis pengikatan agunan, harga pasar dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen.
- d. Jumlah minimal penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk BPR ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor : 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut :
 - 1. BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif.
 - 2. PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
 - 3. PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet

setelah dikurangi dengan nilai agunan.

4. Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. SBI; dan
 - b. bagian dari Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
5. Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
 - b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
 - c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.
- e. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar :
 1. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia; 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
 2. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;
 3. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 4. 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

5. 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
6. 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
7. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
9. 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit;
10. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

4. Kas dan setara kas

- a. Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah atau yang setara kas dan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah;
- b. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan;
- c. Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh

ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain;

- d. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes) dan mata uang emas;
- e. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

5. Aset tetap dan inventaris serta penyusutan

- a. Aset Tetap dan Inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.
- b. Aset tetap dan inventaris, antara lain, meliputi:
 - 1. Tanah.
 - 2. Bangunan.
 - 3. Inventaris (peralatan, perlengkapan dan kendaraan);
- c. Harga perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari :
 - 1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
 - 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
 - 3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi (jika ada).
- d. Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya;
- e. Penyusutan aset tetap dan inventaris dilakukan secara sistematis selama umur manfaatnya.
- f. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana mestinya
- g. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

6. Pengakuan pendapatan bunga

- a. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi

tersebut diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga;

- b. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga;
- c. Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing;
- d. Pendapatan Bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:
 1. Kredit yang termasuk kategori performing diakui secara akrual;
 2. Kredit yang termasuk kategori non-performing (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) diakui secara kas;
- e. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit non-performing harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok dan jika masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga;
- f. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka:
 1. membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur;
 2. bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- g. Apabila terjadi kesalahan pada penggolongan kualitas kredit pada periode yang lalu dan baru diketahui pada periode berjalan dan kesalahan tersebut bersifat material, maka dilakukan koreksi pada periode terjadinya kesalahan pada pos-pos yang terkait.
- h. Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi pada atau sebelum tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian (adjusting subsequent event). Penyesuaian dilakukan atas pos-pos yang terkait.
- i. Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi setelah tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan tidak perlu melakukan penyesuaian atas pos-pos yang terkait periode yang lalu.

7. Pengakuan beban bunga

- a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman;
- b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back dan hadiah deposito berjangka;
- c. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana;
- d. Utang bunga :
 1. Utang Bunga merupakan kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar;
 2. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.
 3. Utang bunga antara lain terdiri dari:
 - a. Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga);
 - b. Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah; dan
 - c. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.
 4. Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.
- e. Beban bunga tabungan :
 1. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga;
 2. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada

simpanan tersebut, misalnya hadiah, cash back yang dapat diatribusikan secara langsung serta premi penjaminan simpanan. Hadiah dan cash back hanya dapat diatribusikan untuk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu;

3. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan; dan
 4. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.
- f. Beban bunga deposito :
1. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito;
 2. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai Beban Bunga; dan
 3. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga;
- g. Beban bunga pinjaman diterima
1. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga; dan
 2. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang Bunga.

8. Pajak penghasilan

- a. Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode;
- b. Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode;
- c. Pajak penghasilan bisa merupakan pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan kini. Sehingga beban pajak penghasilan yang timbul merupakan beban pajak penghasilan kini;
- d. Beban Pajak Kini dihitung berdasarkan laba fiskal.;
- e. Beban Pajak Penghasilan diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan;
- f. Beban Pajak Penghasilan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

9. Imbalan kerja

- a. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja;
- b. Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja;
- c. Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:
 1. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek;
 2. Kewajiban imbalan pascakerja;
 3. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan
 4. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.
- d. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya;
- e. Kewajiban imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya;
- f. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya;
- g. Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat:
 1. Keputusan BPR untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau
 2. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu;
- h. Imbalan kerja termasuk imbalan kerja untuk direksi dan komisaris;
- i. Pos Kewajiban Imbalan Kerja yang dimaksud tidak termasuk imbalan kerja jangka pendek yang termasuk dalam kewajiban segera;
- j. Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu;
- k. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan;
- l. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*);
- m. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).

2. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

2.1. Pertumbuhan Aset

Aset total BPR Kerta Raharja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,89% atau sebesar Rp.10.893.771 ribu yaitu dari Rp.577.885.945 ribu di tahun 2022 menjadi sebesar Rp.588.779.717 ribu pada akhir tahun 2023.

2.2. Rincian penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar - 13,82% atau sebesar Rp.17.447.800 ribu dari sebesar Rp.126.208.168 ribu pada akhir tahun 2022 menjadi Rp.108.760.367 ribu pada akhir tahun 2023 berupa penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

dalam ribuan rupiah

Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Pertumbuhan Nominal	%
Penempatan Giro	43,519,985	70,001,094	(26,481,108)	-37.83%
Penempatan Tabungan	8,396,576	18,929,928	(10,533,351)	-55.64%
Penempatan Deposito	56,843,805	37,277,146	19,566,659	52.49%
Jumlah	108,760,367	126,208,168	(17,447,801)	-13.82%

2.3. Rincian kredit yang diberikan

Seiring dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana, maka bank melakukan penyaluran dana yang sebagian besar disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan. Pada Tahun 2023 Kredit yang diberikan mengalami kenaikan sebesar Rp.32.923.436 ribu atau sebesar 7,22% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp.456.294.246 ribu menjadi Rp.489.217.681 ribu pada tahun 2023 dengan jumlah Debitur sebanyak 9.481 rekening.

Adapun rincian kredit yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

a. Kredit berdasarkan jenis penggunaan;

dalam ribuan rupiah

Jenis Penggunaan	Tahun 2023		Tahun 2022	
	NOA	Baki Debet	NOA	Baki Debet
Modal Kerja	670	7,315,853	788	20,123,170
Investasi	15	2,661,771	9	636,719
Konsumtif dan lainnya	8,796	479,240,057	7,933	435,534,356
Jumlah	9,481	489,217,681	8,730	456,294,246

b. Kredit berdasarkan sektor ekonomi;

dalam ribuan rupiah

Jenis Penggunaan	Tahun 2023		Tahun 2022	
	NOA	Baki Debet	NOA	Baki Debet
Industri Pengolahan	1	8,617	1	8,617
Listrik, Gas dan Air	1	16,128	2	60,497
Konstruksi				
Perdagangan Besar dan Eceran	598	3,183,778	695	3,626,893
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2	3,901	2	3,903
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi			2	7,714
Perantara Keuangan	1	1,111,268	1	2,107,286
Real Estate	6	2,162,770		
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3	154,945	5	256,748
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	75,695	2	143,883
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2	39,904	2	39,904
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	61	1,231,135	68	1,470,461
Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga			19	13,033,983
Bukan Lapangan Usaha – Lainnya	8,795	479,240,057	7,931	435,534,356
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat	1	3,333		
Perdagangan Eceran Makanan, Minuman	7	22,983		
Perantara Keuangan Non Leasing	2	1,963,167		
Jumlah	9,481	489,217,681	8,730	456,294,246

c. Kredit berdasarkan kualitas kredit.

dalam ribuan rupiah

Kualitas Kredit	Tahun 2023		Tahun 2022		Pertumbuhan	
	NOA	Baki Debet	NOA	Baki Debet	Baki Debet	%
Lancar	8,170	447,125,981	7,382	413,739,418	33,386,563	8.07%
DPK	481	22,666,034	546	25,929,465	(3,263,431)	-12.59%
Kurang Lancar	71	2,838,360	69	2,134,811	703,549	32.96%
Diragukan	100	3,380,290	79	2,811,012	569,278	20.25%
Macet	659	13,207,017	654	11,679,540	1,527,476	13.08%
Jumlah	9,481	489,217,681	8,730	456,294,246	32,923,436	7.22%

2.4. Rekapitulasi aset tetap dan inventaris

Aset tetap dan inventaris digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional bank, berikut rekap aset tetap dan inventaris Tahun 2023:

dalam ribuan rupiah

Aset Tetap dan Inventaris	Harga Perolehan		Pertumbuhan		Nilai Buku		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%	2023	2022	Nominal	%
Tanah	520,288	520,288	-	0.00%	520,288	520,288	-	0.00%
Bangunan	7,219,816	7,219,816	-	0.00%	2,256,192	2,617,183	-360,991	-13.79%
Peralatan dan Perlengkapan	3,209,486	3,660,879	-451,393	-12.33%	773,194	930,066	-156,872	-16.87%
Kendaraan	2,999,658	2,979,800	19,858	0.67%	648,773	998,468	-349,695	-35.02%
Aset Tetap Lainnya	3,085,371	2,789,890	295,481	10.59%	604,028	451,473	152,555	33.79%
Jumlah	17,034,619	17,170,673	-136,054	-0.79%	4,802,475	5,517,479	-715,004	-12.96%

2.5. Rincian aset tak berwujud

Pada Tahun 2023 terdapat aset tak berwujud berupa program aplikasi dengan harga perolehan sebesar Rp. 230.922 ribu dan nilai buku sebesar Rp.32.375 ribu.

2.6. Rincian aset lain-lain

Asset lain-lain terdiri dari pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, dan asset lainnya, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

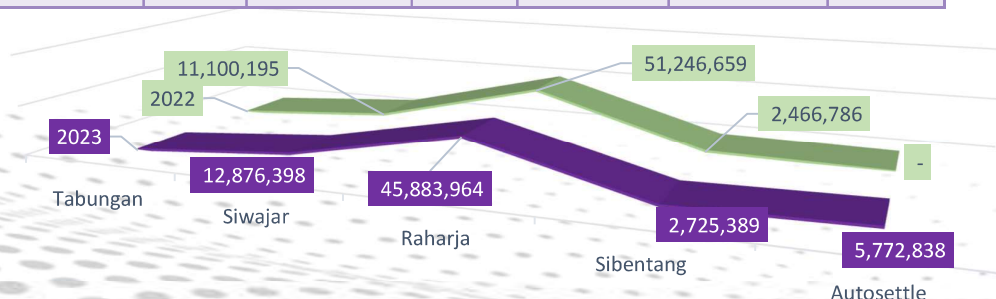
Rincian	Tahun 2023	Tahun 2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	0.00%
Biaya dibayar dimuka	610,347	998,064	(387,717)	-38.85%
Lainnya	3,597,237	3,021,489	575,749	19.06%
Jumlah	4,207,584	4,019,553	188,032	4.68%

2.7. Rincian tabungan dan deposito

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diantaranya dilakukan dalam bentuk tabungan yang pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,77% atau sebesar Rp.2.444.130 ribu dari tahun sebelumnya sebesar Rp.64.813.640 ribu menjadi sebesar Rp.67.257.770 ribu, dengan jumlah penabung sebanyak 22.267 rekening.

dalam ribuan rupiah

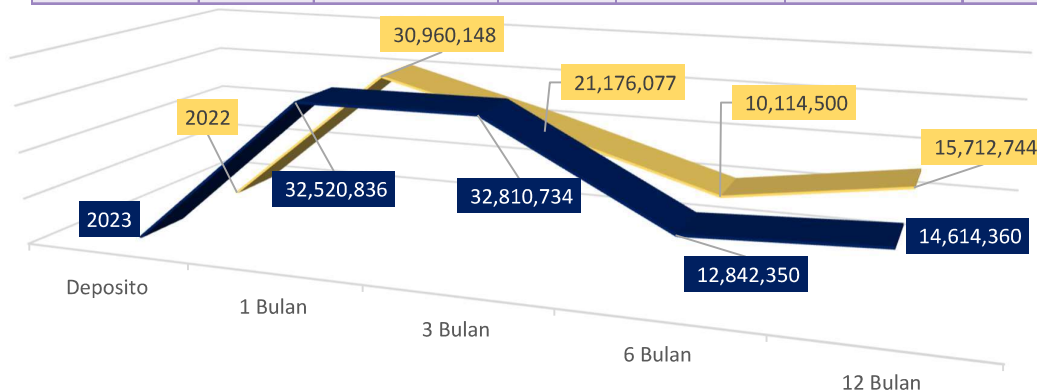
Produk Tabungan	Tahun 2023		Tahun 2022		Pertumbuhan	
	NOA	Nominal	NOA	Nominal	Nominal	%
Siwajar	2,160	12,876,398	1,017	11,100,195	1,776,203	16.00%
Raharja	19,245	45,883,964	19,926	51,246,659	(5,362,695)	-10.46%
Sibentang	862	2,725,389	626	2,466,786	258,604	10.48%
Autosettle	11,239	5,772,838	-	-	5,772,838	0.00%
Jumlah	33,506	67,258,588	21,569	64,813,640	2,444,949	3.77%



Penghimpunan dana lainnya juga dilakukan dalam bentuk Deposito berjangka yang pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.14.824.811 ribu atau sebesar 19,02 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 77.963.469 ribu menjadi sebesar Rp.92.788.281 ribu, dengan jumlah depasan sebanyak 895 rekening atau mengalami peningkatan sebesar 8,88% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 822 rekening.

dalam ribuan rupiah

Produk Deposito	Tahun 2023		Tahun 2022		Pertumbuhan Deposito	
	NOA	Nominal	NOA	Nominal	Nominal	%
1 Bulan	130	32,520,836	117	30,960,148	1,560,688	5.04%
3 Bulan	446	32,810,734	385	21,176,077	11,634,657	54.94%
6 Bulan	142	12,842,350	120	10,114,500	2,727,850	26.97%
12 Bulan	177	14,614,360	200	15,712,744	(1,098,384)	-6.99%
Jumlah	895	92,788,281	822	77,963,469	14,824,811	19.02%



2.8. Rincian simpanan dari bank lain

Salah satu kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Persero) yaitu dalam bentuk simpanan dari bank lain baik berupa deposito maupun tabungan. Simpanan dari bank lain mengalami penurunan sebesar -43,05% atau sebesar -Rp.36.004.275 ribu dari sebesar Rp.83.634.582 pada tahun 2022 menjadi Rp.47.630.308. ribu pada tahun 2023. Adapun rincian simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Simpanan dari Bank Lain	Tahun		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
Deposito	46,900,000	82,925,000	(36,025,000)	-43.44%
Tabungan	730,308	709,582	20,726	2.92%
Jumlah	47,630,308	83,634,582	(36,004,274)	-43.05%

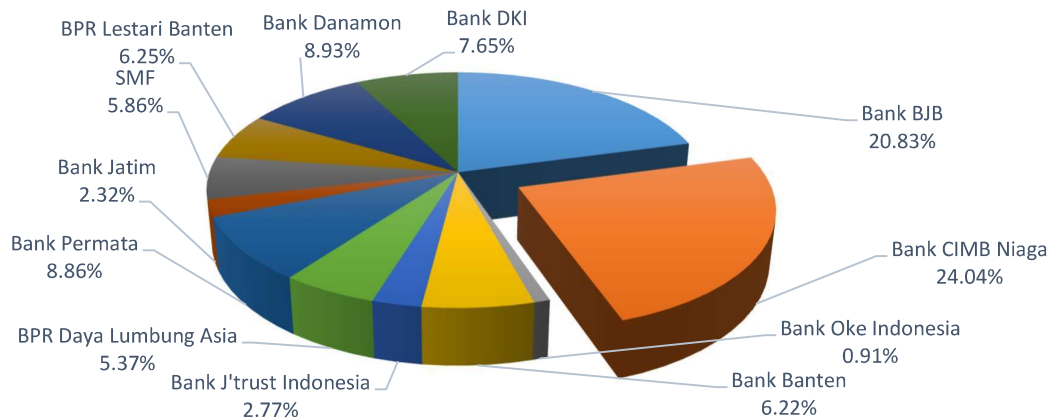
2.9. Rincian pinjaman yang diterima

Kegiatan penghimpunan dana lainnya juga dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa Bank umum dan BPR dalam bentuk pinjaman

yang sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai sebesar Rp.275.070.740 ribu dari 10 (Sepuluh) Bank umum dan 2 (Dua) BPR serta 1 (satu) dari Sarana Multi Finansial, dengan rincian sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Pinjaman diterima	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Nominal	%	Nominal	%
Bank BJB	57,291,667	20.83%	38,250,000	15.81%
Bank CIMB Niaga	66,136,769	24.04%	35,200,000	14.55%
Bank Oke Indonesia	2,500,000	0.91%	12,666,667	5.23%
Bank Banten	17,100,000	6.22%	12,833,333	5.30%
Bank J'trust Indonesia	7,618,604	2.77%	15,551,063	6.43%
BPR Daya Lumbung Asia	14,771,590	5.37%	18,142,190	7.50%
Bank Permata	24,375,000	8.86%	36,875,000	15.24%
Bank Jatim	6,375,000	2.32%	7,125,000	2.94%
SMF	16,116,910	5.86%	6,459,256	2.67%
BPR Lestari Banten	17,182,323	6.25%	19,330,258	7.99%
Bank Danamon	24,572,877	8.93%	29,688,600	12.27%
Bank DKI	21,030,001	7.65%	9,840,000	4.07%
Jumlah	275,070,740	100%	241,961,367	100%



2.10. Rincian kewajiban lain-lain

Kewajiban lain-lain terdiri dari biaya tenaga kerja, dana kesejahteraan, dan dana pembinaan dengan rincian sebagai berikut :

dalam ribuan rupiah

Kewajiban Lain-lain	Tahun		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
Biaya Tenaga Kerja		3,237	(3,237)	-3.49%
Dana Kesejahteraan				0.00%
Dana Pembinaan	339,138	243,067	96,071	103.49%
Jumlah	339,138	246,304	92,834	100.00%

2.11. Rincian Pendapatan

Total Pendapatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.1.280.282

ribu atau sebesar -1,40%, yaitu dari sebesar Rp.91.618.027 ribu pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.90.337.744 ribu pada tahun 2023.

Hal tersebut secara umum terkait dengan perbaikan kualitas kredit dan peningkatan aktiva produktif terutama kredit yang diberikan yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional berupa pendapatan bunga yang mengalami kenaikan sebesar 6,06% atau sebesar Rp.4.976.696 ribu dari Rp.82.079.029 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp.87.055.998 ribu pada tahun 2023 dan pendapatan operasional lainnya turun sebesar -68,14% atau sebesar Rp.6.144.467 ribu dari Rp.9.017.151 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp.2.872.684 pada ribu pada tahun 2023.

dalam ribuan rupiah

Pendapatan	Tahun		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
Pendapatan Bunga	87,055,998	82,079,029	4,976,969	6.06%
Pendapatan Operasional Lainnya	2,872,684	9,017,151	- 6,144,467	-68.14%
Pendapatan non Operasional	409,062	521,847	- 112,785	-21.61%
Jumlah	90,337,744	91,618,027	(1,280,282)	-1.40%

2.12. Rincian Beban

Beban Bank mengalami kenaikan sebesar 6,38% atau sebesar Rp.5.063.137 ribu dari sebesar Rp.79.383.535 ribu pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.84.446.672 ribu pada tahun 2023. Dengan rincian biaya bunga mangalami kenaikan sebesar 15,14%, atau sebesar Rp.4.878.582 ribu.

Biaya PPAP mengalami penurunan sebesar Rp.2.135.735 ribu atau sebesar -34,10%, biaya pemasaran mengalami kenaikan 5,66% atau sebesar Rp.68.048 ribu dari Rp.769.212 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp.812.785 ribu pada tahun 2023. Biaya administrasi dan umum mengalami pertumbuhan sebesar 5,25% atau sebesar Rp.1.872.482 ribu dari Rp.35.668.521 ribu pada tahun 2022 menjadi Rp.37.541.003 ribu pada tahun 2023.

dalam ribuan rupiah

Beban	Tahun		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
Beban Bunga	37,097,329	32,218,746	4,878,582	15.14%
Beban PPAP	4,126,532	6,262,267	- 2,135,735	-34.10%
Beban Penyusutan & Amortisasi	1,363,059	1,295,011	68,048	5.25%
Beban Pemasaran	812,785	769,212	43,574	5.66%
Beban Administrasi&Umum	37,541,003	35,668,521	1,872,482	5.25%
Beban Operasional Lainnya	3,014,496	2,721,976	292,520	10.75%
Beban non Operasional	491,468	447,802	43,666	9.75%
Jumlah	84,446,672	79,383,535	5,063,137	6.38%

2.13. Laba Usaha

Laba sebelum pajak dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp.6.343.419 ribu atau sebesar -51,85% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.12.234.492 ribu menjadi sebesar Rp.5.891.072 ribu dan laba setelah pajak turun sebesar Rp.4.991.746 ribu dari sebesar Rp.9.542.904 ribu pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.4.551.158 ribu pada tahun 2023.

dalam ribuan rupiah

Laba Usaha	Tahun		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
Laba Sebelum Pajak	5,891,072	12,234,492	- 6,343,419	-51.85%
Taksiran Pajak Penghasilan	1,339,914	2,691,588	- 1,351,674	-50.22%
Laba Setelah Pajak	4,551,158	9,542,904	- 4,991,746	-52.31%

2.14. Transaksi hubungan istimewa

Berdasarkan POJK No.23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS Pasal 8, bahwa pihak terkait dengan BPR meliputi :

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS;
2. Anggota Direksi;
3. Anggota Dewan Komisaris;
4. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari:
 - a. perorangan yang merupakan pengendali BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau huruf c;
5. Pejabat eksekutif;
6. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan;
7. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut;
8. BPR atau BPRS lain yang:

- a. Anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan
- b. Rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain dimaksud paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS;
9. Perusahaan yang paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan
10. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana.

2.15. Rincian transaksi hubungan istimewa

1. Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban, meliputi :

Rincian kredit yang diberikan kepada pihak terkait;

dalam ribuan rupiah

Nama	Kredit yang diberikan		% Aset	Hubungan Keterkaitan
	Plafond	Baki Debet		
Total Aset BPR			589,680,191	
Bangbang Purnawan	200,000	166,667	0.03%	Pengurus
Beni subarsyah	150,000	100,000	0.02%	Pengurus
Ai Suherlan	225,000	37,500	0.01%	Pengurus
Deni Setia Wahyudi	300,000	150,000	0.03%	Pengurus
Denny Kristiyanto DN	610,000	512,192	0.09%	Pejabat Eksekutif
Ahmad Firdaus	200,000	26,667	0.00%	Pejabat Eksekutif
Natalia Tri Rahayu	200,000	129,167	0.02%	Pejabat Eksekutif
Ashadi Ruswandi	330,000	324,500	0.06%	Pejabat Eksekutif
Irfan Hilmi Handriana	65,000	46,042	0.01%	Pejabat Eksekutif
Abdul Ghani	150,000	145,833	0.02%	Pejabat Eksekutif
Rochaidin	650,000	646,447	0.11%	Pejabat Eksekutif

2. Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

a. Sifat hubungan :

dalam ribuan rupiah

Pemegang Saham	Kepemilikan Modal di BPR		Hubungan Keterkaitan		
	Rp.	%	Nama/ Badan Hukum	Sifat Hubungan	%
Pemkab. Tangerang	198,350,000	79.34%	PT. LKM Artha Kerta Raharja	Keuangan	76.00%
			PD. Pasar Niaga Kerta Raharja	Keuangan	100.00%
Pemprov. Banten	50,000,000	20.00%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	33.01%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	2.35%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	5.84%
			4. PT. Jamkrida Banten	Keuangan	90.03%
Pemprov. Jawa Barat	600,000	0.24%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	7.59%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	1.18%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	2.63%
PT. Bank BJB	1,050,000	0.42%	1. PT. BPR Serang (Perseroda)	Kepemilikan	5.00%
			2. PD. BPR Berkah	Kepemilikan	1.00%
			3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)	Kepemilikan	3.00%
Komisaris					
1. Drs. Yusuf Herawan	-	0,00%			
2. Bangbang Purnawan	-	0,00%	PT. BPR Hariarta Sedana	Komisaris	
3. Beni Subarsyah	-	0,00%	PT. BPR Baleendah Rahayu	Komisaris	
Direksi :					
1. Ai Suherlan	-	0,00%	-		-
2. Uus Mustaudie	-	0,00%	-		-
3. Deni Setia Wahyudi	-	0,00%	-		-

b. Jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa :

1. Penempatan dalam bentuk tabungan;
2. Penempatan dalam bentuk deposito;
3. Pemberian kredit;
4. Penerimaan simpanan dalam bentuk tabungan;
5. Penerimaan simpananan dalam bentuk deposito;
6. Penjaminan kredit.

c. Kebijakan persyaratan transaksi hubungan istimewa :

1. Persyaratan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa diperlakukan sama dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPR;
2. Pemberian suku bunga yang lebih rendah kepada Pengurus dan Pegawai dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif terhadap pihak yang terkait dengan BPR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rasio Keuangan

Ditinjau dari rasio keuangan, beberapa parameter rasio mencatat mengalami sedikit kenaikan

maupun penurunan. Pencapaian rasio-rasio secara keseluruhan masih dalam level rasio yang sehat.

RASIO-RASIO KEUANGAN		
	2023	2022
KPMM Tier 1	25.85%	24.06%
KPMM Tier 2	24.61%	23.83%
KAP	2.87%	3.05%
NLP Gross	3.97%	3.64%
NPL Netto	2.15%	1.80%
ROA	1.00%	2.22%
ROE	4.44%	9.26%
NIM	8.35%	9.70%
BOPO	93.36%	86.65%
Cash Ratio	25.07%	63.29%
LDR	86.47%	86.12%
1 Persentase Pelanggaran BMPK		
a. Pihak Terkait	-	-
b. Pihak Tidak Terkait	-	-
2 Persentase Pelampauan BMPK		
a. Pihak Terkait	-	-
b. Pihak Tidak Terkait	-	-

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tingkat Kesehatan BPR periode Laporan 31 Desember 2023

Faktor / Komponen	Penilaian TKS Posisi Laporan Semester 2 Tahun 2023				Penilaian TKS Posisi Laporan Semester 1 Tahun 2023			
	Rasio (%)	Peringkt (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)
Profil Risiko		2	25%	0.5		2	25%	0.5
Tata Kelola		2	30%	0.6		2	30%	0.6
Rentabilitas		3	15%	0.45		1	15%	0.15
1. Return on Asset (ROA)	1,00%	3			2.25%	1		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	93.36%	3			87.62%	2		
3. Net Interest Margin (NIM)	8.35%	2			11.20%	1		
Permodalan		1	30%	0.3		1	30%	0.3
1. Rasio KPMM	25.85%	1			24.64%	1		
2. Rasio MIAPB	972.52%	1			478.69%	1		
Nilai Komposit				1.85	Nilai Komposit			1.55
Peringkat Komposit				2 (Sehat)	Peringkat Komposit			2 (Sehat)

4. Komitmen dan kontinjensi

4.1. Pengungkapan Komitmen

Tidak terdapat kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang kepada pihak lain dan/atau pihak yang terkait;

4.2. Pengungkapan Kontinjensi

- a. Tidak terdapat perkara atau sengketa hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang; dan
- b. Tidak terdapat kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, dan denda.

Dalam Ribuan Rupiah

Rekening Administratif	31-Des-2023	31-Des-2022
TAGIHAN KOMITMEN		
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	77,308,623	58,557,476
b. Tagihan Komitmen lainnya		
KEWAJIBAN KOMITMEN		
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
b. Penerusan kredit (Channelling)		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
TAGIHAN KONTINJENSI	23,001,790	21,098,244
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian		
1). Bunga Kredit yang Diberikan	5,568,544	4,504,938
2). Bunga Penempatan pada Bank Lain		
b. Aset produktif yang dihapusbukukan		
1). Kredit yang Diberikan	13,484,246	12,857,375
2). Penempatan pada Bank Lain		
3). Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	3,948,999	3,735,931
4). Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapusbuku		
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
KEWAJIBAN KONTINJENSI		
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA		

5. Perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR

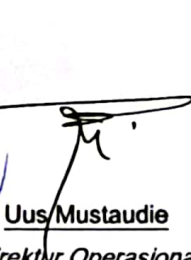
Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017, bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).

Bahwa PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) telah menerapkan standar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR sejak periode laporan yang berakhir per 31 Desember 2013, maka peraturan baru tersebut pada periode laporan tidak mempengaruhi aktivitas dan estimasi keuangan BPR.

Tangerang, Februari 2024

Direksi

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

  
Al Suherlan
 Direktur Utama

Uus Mustaudie
 Direktur Operasional


Deni Setia Wahyudi
 Direktur SDM, Umum & Kepatuhan